



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan, serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada perubahan tugas, fungsi, dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, perlu melakukan perubahan kembali terhadap rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung perubahan kebijakan dan dinamika organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 635);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 17/PERMEN-
KP/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan dapat direview sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan periode terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2024, sehingga menjadi periode penuntasan agenda pembangunan kelautan dan perikanan jangka panjang yang belum terlaksana.

Visi Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. pembangunan sumber daya manusia;
2. pembangunan infrastruktur;
3. penyederhanaan regulasi;
4. penyederhanaan birokrasi; dan
5. transformasi ekonomi.

Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan nasional tersebut, terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Sektor kelautan dan perikanan menghadapi tantangan yang semakin kompleks berupa ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari dalam negeri misalnya pandemi

Corona Virus Disease (Covid-19) yang telah menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,07 persen pada tahun 2020, yang merupakan pertumbuhan negatif pertama sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Adapun ancaman yang berasal dari luar negeri, misalnya penurunan daya beli masyarakat yang dialami oleh hampir seluruh negara, ketidakstabilan geopolitik yang mempengaruhi jalur distribusi produk, hingga isu pengetatan pasar akibat dampak dari pandemi dan perang yang berkepanjangan di beberapa negara.

Sebagai negara dengan potensi sumber daya maritim terbesar dunia, Indonesia masih tertinggal dalam menerapkan tata kelola pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan. Pelarangan operasi bagi kapal dengan karakteristik tertentu justru telah mempengaruhi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Kontribusi pajak sektor kelautan dan perikanan bagi negara dapat dikatakan sangat minim apabila dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada. Selain itu, Indonesia dihadapkan dengan isu sampah plastik laut yang memerlukan penanganan dan pengendalian dengan serius. Pada sisi yang lain, isu pemanfaatan ruang laut juga telah menjadi isu utama berupa harmonisasi kewenangan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) yang dilaksanakan selama ini berbasis *input control* dimana tidak ada pembatasan terhadap volume hasil tangkapan ikan di wilayah perairan yang ditentukan. Kebijakan usaha penangkapan ikan hanya mengatur jumlah dan ukuran kapal serta alat penangkapan ikan yang digunakan. Pengelolaan SDI tersebut menyebabkan munculnya potensi *over fishing*, *markdown* ukuran kapal perikanan, pendataan produksi kurang akurat, serta penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan tidak mencerminkan sumber daya yang dieksploitasi. Di samping itu, masih banyak hal dari pengelolaan perikanan di tanah air selama ini yang harus dibenahi, antara lain penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, penanganan ikan hasil tangkapan yang tidak memperhatikan aspek-aspek cara penanganan ikan yang baik dan higienis untuk mempertahankan mutu/kualitas ikan hasil tangkapan,

fasilitas pelabuhan perikanan yang kurang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi total atas pengelolaan SDI di tanah air.

Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan kebijakan pengaturan penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian SDI dan lingkungannya, serta untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep penangkapan ikan terukur yang terkoneksi dengan industri pengolahan hasil perikanan diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional sebagai penghasil devisa, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan menguatkan industri berbasis komoditas unggulan atau industri berkonsep *zero waste* sehingga akan menyumbang pertumbuhan wilayah secara keseluruhan, namun tetap menjamin keberlanjutan SDI serta melindungi *ecosystem service* lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan reformulasi arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang menekankan ekologi sebagai panglima yang harus seimbang antara pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan keberlanjutan ekologi. Berdasarkan berbagai literatur, dapat diketahui terdapat lima prinsip implementasi ekonomi biru di Indonesia yakni (1) menjaga kesehatan laut (*ocean health*); (2) pemanfaatan yang berkelanjutan (*sustainable use*); (3) pembangunan yang berkeadilan (*inclusive equity*); (4) pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan (5) membangun kesadaran masyarakat (*public awareness*). Kebijakan ekonomi biru diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Diharapkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan utama berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

B. Kondisi Umum

Capaian KKP dalam pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2023, antara lain:

1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) yang merupakan salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang diukur dengan menggunakan dua variabel pokok yaitu ekonomi dan sosial.

Pada tahun 2020 realisasi IKMKP mencapai 58,31 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 62,75. Indikator dimensi ekonomi yang digunakan mencakup Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Usaha Pembudi Daya (NTUPi), Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), dan Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Indikator dimensi sosial dan kelembagaan meliputi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan, jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang meningkat kelasnya, dan jumlah kelompok kelautan dan perikanan yang diberikan penyuluhan. NTN pada tahun 2020 mencapai 100,22 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,40. NTPi pada tahun 2020 mencapai 100,55 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 104,83. NTPHP pada tahun 2020 mencapai 103,95 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 104,67. NTPG pada tahun 2020 mencapai 80,68 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 463,05.

2. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2020 mencapai 51,80 persen dan tahun 2023 mencapai 58,18 persen.

Capaian tersebut dihasilkan dari perhitungan jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut sebesar 6.987.856 ton dibandingkan dengan total estimasi potensi SDI sebesar 12.011.071 ton/tahun, diluar produksi Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tahun 2020 mencapai 0,73 persen dan tahun 2023 meningkat mencapai 5,49 persen.
Pertumbuhan PDB Perikanan tersebut telah melampaui pertumbuhan PDB kelompok pertanian tahun 2019 yaitu sebesar 3,64 persen dan pertumbuhan PDB Nasional tahun 2019 yang besarnya 5,02 persen. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDB Perikanan tahun 2020 mengalami fluktuasi penurunan dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 dan di tahun 2023 tumbuh positif. Pencapaian pertumbuhan PDB Perikanan belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha subsektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan regulasi turunannya, baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergarman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.
4. Produksi perikanan tahun 2020 mencapai 21,83 juta ton dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 24,74 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 7,77 juta ton dan produksi perikanan budi daya sebesar 16,97 juta ton (termasuk rumput laut).
Capaian produksi perikanan yang meningkat setiap tahun mendukung ketahanan pangan nasional utamanya dalam penyediaan protein hewani untuk peningkatan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penurunan *stunting*;
5. Produksi garam nasional tahun 2020 mencapai 1,37 juta ton dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 2,55 juta ton.
Capaian tersebut didukung oleh capaian produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam.
6. Nilai ekspor hasil perikanan tahun 2020 mencapai USD 5,21 miliar dan pada tahun 2023 meningkat mencapai USD 5,63 miliar.
Capaian nilai ekspor hasil perikanan Indonesia tahun 2023 mencapai USD 5,63 miliar (angka sementara) atau mencapai

83,16 persen terhadap target tahun 2023 (USD 6,77 miliar). Jika dibanding target jangka menengah tahun 2024 (USD 8 miliar), maka capaian ini telah mencapai 70,37 persen.

7. Tingkat konsumsi ikan pada tahun 2020 mencapai 54,56 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 57,61 kg/kapita/tahun.

Capaian tersebut didukung oleh kampanye nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan di seluruh provinsi. Terdapat tiga pilar penyokong tingkat konsumsi ikan yakni penguatan *demand* melalui pertumbuhan permintaan ikan, penguatan *supply* melalui program peningkatan tingkat produksi, dan penguatan kerja sama dengan mitra instansi pemerintah dan masyarakat. Selain itu kegiatan promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri turut memberi andil dalam peningkatan konsumsi ikan.

8. Luas kawasan konservasi perairan pada tahun 2020 mencapai 24,11 juta hektar (ha) dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 29,20 juta hektar.

Capaian tersebut merupakan keberhasilan KKP dalam penyampaian program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional maupun global kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Selain itu juga didukung oleh kuatnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga terkait, perguruan tinggi, mitra Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non-Governmental Organization*, dan masyarakat.

9. Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun 2020 mencapai 94,76 persen dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 97,96 persen.

Capaian tersebut diperoleh dari 2.589 pelaku usaha yang patuh dari 2.643 pelaku usaha diperiksa. Hal ini didukung oleh beberapa faktor antara lain konsistensi pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan dan penerapan sanksi administratif kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang melanggar sebagai implementasi dari penerapan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Target akhir kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan pada Renstra KKP tahun 2020-2024 sebesar 98 persen dapat tercapai apabila KKP berupaya terus konsisten melaksanakan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) untuk mengawal kebijakan KKP.

10. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang melaksanakan penangkapan ikan terukur pada tahun 2022 dan tahun 2023 capaiannya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Indikator ini baru muncul di tahun 2022 sehingga angka capaian tahun 2020 belum ada. Adapun angka capaian indikator ini dihitung dari jumlah WPP yang melaksanakan prinsip-prinsip penangkapan ikan terukur dengan persyaratan:
 - a. pengaturan pelabuhan pangkalan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, bongkar muat ikan, dan mengisi perbekalan; dan
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas pendataan hasil tangkapan dengan penguatan teknologi Informasi.
11. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pada tahun 2020 mencapai sebesar 54,82 persen dan tahun 2023 mencapai 74,17 persen.
12. PNBP sektor kelautan dan perikanan selama tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp0,86 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,69 triliun di tahun 2023.

PNBP sektor kelautan dan perikanan merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat pada sektor kelautan dan perikanan melalui unit organisasi eselon I lingkup KKP yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Ditjen PB), Direktorat

Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).

13. Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) pada tahun 2020 mencapai 78,27 dengan kategori BB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan kategori A, dan KKP meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan tahun 2023.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, sampai tahun 2024 telah dilakukan penyusunan kebijakan dengan melibatkan peran serta masyarakat guna memenuhi aspirasi masyarakat, antara lain penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Perlindungan dan pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan dalam mengelola SDI dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, serta memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan bantuan hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai dokumen integrasi kepentingan seluruh Kementerian/Lembaga untuk pembangunan dan rencana pemanfaatan ruang laut. Rencana tata ruang laut dapat digunakan sebagai alat kendali pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ruang laut karena menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan kelautan nasional, penyusunan perencanaan zonasi untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan antarwilayah, serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan juga sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan dan pengelolaan ruang laut.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Peraturan ini dibuat sebagai acuan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia dengan tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Diharapkan dengan peraturan ini dapat menghapus praktik kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Peraturan ini dibuat sebagai aturan dalam pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan untuk menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut, mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem laut, dan menjaga fungsi alur.

Beberapa penghargaan yang didapatkan KKP sampai dengan tahun 2023 antara lain:

1. Penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2022.

KKP mendapatkan nilai 98 dan termasuk di dalam ranking 10 besar, dalam kategori EKA ACALAPATI, yaitu diartikan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang bernilai tinggi dalam pengelolaan JDIH dan dapat dijadikan contoh bagi anggota JDIHN lainnya;

2. Predikat terbaik pertama sebagai instansi *pilot project* penerapan sistem informasi kinerja kategori kementerian/lembaga atas pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), pengusulan dan persetujuan pada aplikasi kinerja. bkn.go.id;
3. Pemenang pada ajang *Public Relation Indonesia Award* Tahun 2022 untuk Sub-Kategori *E-Magazine, Bronze Winner*–Si Mila (Generasi Cinta Laut) Edisi 7 2021 [Peduli di masa Pandemi], Sub-Kategori Video *Profile, Silver Winner* dan Sub-Kategori Aplikasi, *Gold Winner*;
4. Penghargaan sebagai Nomine atas Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha KL pada Anugerah Layanan Investasi 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
5. Peringkat ke-3 pada ajang Subroto Award Bidang Efisiensi (PSBE) tahun 2022 kategori Penghematan Energi di Instansi Pemerintah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 dan Tahun 2022;
7. Hasil Pengawasan Kearsipan KKP dengan Predikat A (memuaskan) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
8. Predikat Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk kategori kementerian/lembaga atas prestasi KKP dalam mengembangkan simpul jaringan dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. KKP juga mendapat predikat Bhumandala Kencana untuk kategori Geoportal terbaik dari Badan Informasi geospasial (BIG);
9. Predikat A untuk Evaluasi atas SAKIP Tahun 2022 dengan nilai 82,84 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

10. Penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas Keberhasilannya menerapkan Sistem Merit dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi tahun 2023 dengan kualitas SANGAT BAIK; dan
11. Predikat Mentor pada penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau, dan yang sudah dibakukan dan didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejumlah 16.671 pulau. Luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² yang terdiri dari luas laut teritorial 0,29 juta km², luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia 3,00 juta km². Selain itu Indonesia memiliki luas Zona Tambahan perairan 0,27 juta km², luas landas kontinen 2,8 juta km², dan panjang garis pantai 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, 2018).

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, OTEC (*Ocean Thermal Energy Conversion*)), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan

alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. SDI di laut Indonesia meliputi 37 persen dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis di antaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut.

Potensi lestari SDI laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dengan Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan (JTB) 8,6 juta ton per tahun berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budi daya ikan juga selalu meningkat sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya budi daya laut untuk berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, budi daya tambak untuk komoditas udang dan bandeng, serta budi daya air tawar seperti ikan mas, nila, lele, dan patin.

Indonesia mempunyai potensi lahan perikanan budi daya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budi daya air tawar 2,8 juta ha (15,8 persen), lahan budi daya air payau 2,96 juta ha (16,5 persen) dan lahan budi daya laut 12,12 juta ha (67,7 persen). Pemanfaatan potensi lahan perikanan budi daya baru mencapai 1.069.223 ha (pemanfaatan 6,0 persen), yang terdiri atas pemanfaatan lahan budi daya laut 102.254 ha (0,8 persen), pemanfaatan lahan budi daya tambak 679.448 (22,9 persen), dan pemanfaatan lahan budi daya air tawar 287.521 (10,2 persen) (Kelautan dan Perikanan dalam Angka, KKP 2022).

Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta ha (BPS, 2021) atau sekitar 10 persen dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km²

(Spalding *et al.* 2001) dengan penyumbang terbesar adalah *coral triangle* yang menyumbang sekitar 34 persen (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.* 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70 persen lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik.

Selanjutnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Oseanografi (P2O) menyatakan bahwa penelitian dan pemantauan terumbu karang terhadap 1.067 *site* di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kategori jelek sebanyak 386 *site* (36,18 persen), kategori cukup sebanyak 366 *site* (34,3 persen), kategori baik sebanyak 245 *site* (22,96 persen), dan kategori sangat baik sebesar 70 *site* (6,56 persen). Indonesia juga mempunyai wilayah lamun dan *mangrove* yang luas. Berdasarkan penelitian P2O-LIPI (2018) luasan lamun Indonesia seluas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan *mangrove* berdasarkan data *One Map Mangrove* (2018) seluas 3,5 juta ha. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya nonhayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum dikelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang belum tergarap secara optimal.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kelautan dan perikanan memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sehingga memiliki kapasitas dan kompetensi yang diharapkan untuk optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Permasalahan

Sektor kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi utamanya dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini di antaranya:

- a. produktivitas armada penangkapan ikan yang masih belum optimal dan struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional;
- b. kegiatan usaha budi daya ikan di Indonesia masih didominasi oleh pembudi daya skala kecil, teknologi tradisional, produktivitas yang rendah, penurunan daya dukung perairan dan lingkungan, dampak perubahan iklim, nilai tambah yang masih relatif kecil, serta pemanfaatan lahan yang belum optimal, dan biaya produksi yang tinggi;
- c. ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;
- d. akses permodalan untuk peningkatan skala usaha;
- e. daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan;
- f. persyaratan mutu nasional dan internasional sebagai persyaratan ekspor bersifat dinamis;
- g. konsistensi implementasi sistem jaminan mutu hulu-hilir di setiap rantai produksi belum terintegrasi dan perlu ditingkatkan;
- h. infrastruktur jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu ditingkatkan;
- i. sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam, budi daya ikan, dan lain lain; dan
- j. degradasi ekosistem, perubahan iklim, dan cuaca ekstrim.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. pengelolaan SDI berbasis WPPNRI belum berbasis pendekatan keberlanjutan ekosistem dan dilakukan secara terukur, termasuk kelembagaan pengelola WPPNRI yang handal;
- b. harmonisasi ruang laut dan ruang darat untuk penguatan melalui penyelarasan Rencana Tata Ruang (RTR) menurut klasifikasinya dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), dan Rencana Tata Ruang Laut (RTRL);
- c. pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta potensi ekonomi yang ada pada perairan di sekitarnya;
- d. masih terjadinya praktik *IUU fishing* dan *destructive fishing*;
- e. penerapan *good aquaculture practices* masih belum dilaksanakan secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budi daya; dan
- f. sinergi *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Permasalahan yang dihadapi sektor kelautan dan perikanan:

- a. belum optimalnya pengelolaan SDI secara berkelanjutan dan adanya degradasi SDI akibat eksploitasi melebihi batas kemampuan ikan untuk melakukan regenerasi;
- b. tingkat produktivitas kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih perlu ditingkatkan;
- c. infrastruktur dan konektivitas pelabuhan perikanan serta sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai; dan
- d. belum optimalnya akses nelayan terhadap faktor produksi termasuk permodalan serta sistem perlindungan yang harus terus dikembangkan
- e. masih terjadi praktik *IUU Fishing*;

- f. pengelolaan perikanan belum sepenuhnya mempertimbangkan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi dan belum secara optimal memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi dari sektor maritim;
- g. produktivitas budi daya masih rendah;
- h. ketersediaan benih bermutu dan induk unggul yang masih terbatas serta masih tingginya harga pakan;
- i. produk hasil perikanan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan pasar;
- j. masih terbatasnya akses permodalan dan alternatif skema pembiayaan bagi usaha perikanan;
- k. sarana dan prasarana perikanan, khususnya sarana dan prasarana dasar belum memadai;
- l. masih terdapat hambatan tarif dan nontarif dalam kinerja ekspor hasil perikanan;
- m. belum efisiennya/masih tingginya biaya logistik hasil kelautan dan perikanan;
- n. pengalihan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi pasca penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- o. Ratifikasi *Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* 1995 (STCW-F);
- p. pengalihan pengelolaan penyuluh perikanan provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai KKP sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi Pegawai Negeri Sipil KKP;

- q. terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- r. produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas; dan
- s. wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Permasalahan pengembangan perikanan budi daya yaitu terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul dan bermutu, harga pakan yang masih mahal mengakibatkan biaya produksi tidak efisien, penyakit, kapasitas sumber daya manusia, kondisi infrastruktur yang belum memadai dan terbatas untuk mendukung usaha perikanan budi daya yaitu antara lain balai benih ikan, saluran irigasi, listrik, jalan produksi, laboratorium kesehatan ikan, laboratorium kultur jaringan. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan perikanan budi daya secara berkelanjutan adalah terjadinya asimetrik regulasi yang bersifat intrasektoral dan intersektoral, persyaratan perizinan yang sangat kompleks, kelembagaan pembudi daya ikan masih belum *bankable*, dan keterbatasan akses permodalan.

Permasalahan daya saing industri perikanan nasional untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki masih perlu dioptimalkan untuk menjawab permintaan global yang terus berubah dan semakin ketat. Perluasan investasi asing dan dalam negeri, peningkatan produksi unit pengolahan ikan, penanganan pasca panen yang baik, diversifikasi produk baru sesuai tuntutan pasar, pengembangan sarana dan prasarana, penguatan sistem logistik, dan keberlanjutan usaha perlu terus dilakukan. Selain itu, pemerintah berupaya untuk menangani permasalahan permodalan, penurunan hambatan tarif dan nontarif, guna memperkuat pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Di sisi lain upaya penguatan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dihadapkan pada permasalahan dengan belum optimalnya penerapan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir (kapal, tambak, *supplier*, dan unit pengolah ikan),

masih kurangnya sarana dan prasarana inspeksi dan laboratorium pengujian, sarana layanan dan pengawasan di sentra-sentra produksi, serta di pintu-pintu pos lintas batas negara dan di bandara/pelabuhan baru.

Praktik-praktik IUU (*Illegal, Unregulated, Unreported*) Fishing di WPPNRI baik dalam bentuk pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh Kapal Perikanan Indonesia (KII) masih menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, masalah perbatasan laut juga masih menjadi salah satu faktor maraknya pencurian ikan di wilayah perairan perbatasan seperti Laut Natuna sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah utara, dan Selat Malaka karena terdapat *unresolved area* dengan negara tetangga. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan akan terus menjadi dilema. Saat ini untuk menanggulangi hal tersebut, kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan dan pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya), peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional maupun internasional, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional garam dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Sebagai negara yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun laut, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budi daya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budi daya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana.

Permasalahan lainnya yang masih dihadapi Indonesia yaitu masih adanya masyarakat yang kekurangan gizi (*undernutrition*) dan kerdil (*stunting*). Penyelesaian permasalahan ini membutuhkan peran sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menyediakan sumber pangan bergizi berbasis protein ikan dengan jumlah dan aksesibilitas yang memadai.

Masalah penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia meliputi bidang pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga beberapa Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) resmi dialihkan statusnya menjadi Politeknik Kelautan dan Perikanan yang merupakan satuan pendidikan vokasi sehingga diperlukan penyusunan kurikulum dan program akademik yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan kompetensi kerja lulusan sesuai dengan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) yang dibutuhkan oleh DUDI.

Peningkatan kualitas SDM perikanan, standar keamanan, keselamatan dan perlindungan bagi SDM perikanan Indonesia yaitu target ratifikasi STCW-F sehingga perlu dilakukan persiapan ratifikasi dan segera diimplementasikan agar SDM Indonesia mampu bersaing secara global. Kemampuan pelaut Indonesia yang telah mendunia belum

diikuti dengan kepemilikan sertifikat kompetensi sehingga diperlukan peningkatan kualitas anak buah kapal (ABK) melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi personel yang dipekerjakan di kapal penangkap ikan dan peningkatan standar pelatihan dan keselamatan di industri perikanan dan armada kapal penangkap ikan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan kehidupan dan properti di laut dalam industri perikanan.

Permasalahan lain terkait dengan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDMKP) yaitu pelaksanaan pengalihan PNS daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pasca terbitnya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebabkan garis koordinasi antara penyuluh dengan BPPSDM terlalu panjang sehingga kinerja penyuluh masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa aspek antara lain kelembagaan penyuluhan perikanan yang belum berjalan optimal, legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia, kualitas dan kuantitas penyuluh masih belum memadai, prasarana dan sarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh serta pembiayaan penyuluhan masih terbatas.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan, yaitu:

1. aspek ekologi yang diprioritaskan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
2. aspek ekonomi yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan pendapatan, serta penyerapan tenaga kerja;
3. aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. kerangka kebijakan dan hukum nasional terkait dengan peningkatan keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dan terkait ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan;
5. sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah utamanya menyangkut sinergi dan dukungan lintas Kementerian/Lembaga terkait serta dinas kelautan dan perikanan provinsi dan kabupaten/kota;
6. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta teknologi informasi yang terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang handal sangat diperlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di satu WPPNRI yang berguna untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan SDI dan pertumbuhan ekonomi;
7. kapasitas sumber daya manusia utamanya berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra-sentra kelautan dan perikanan; dan
8. sistem pengawasan utamanya terkait dengan jaminan ketertiban pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan demi terjaganya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan strategis eksternal yang secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yakni: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *United Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) 1995*, *FAO Compliance 1993*, *Port State*

Measures Agreement 2009, Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plan of Action, Sustainable Development Goals (SDGs) kelautan dan perikanan, dan *The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* pada tahun 1994. Selain itu terdapat juga organisasi pengelolaan perikanan regional atau *Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)* yang melingkupi perairan Indonesia seperti *Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)*, *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)*, dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)*. Selanjutnya terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan Regional, seperti *World Trade Organization (WTO)*, dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, Konvensi dan kerja sama *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*, *International Coral Reef Initiative (ICRI)*, dan *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*. Sebagai bagian dari entitas pada hukum dan perjanjian internasional tersebut, maka Indonesia harus mampu mengoptimalkan keterlibatannya, termasuk melalui keanggotaan *High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. luas kawasan konservasi sebagai kawasan cadangan ikan untuk memberikan efek *spillover* terhadap stok sumber daya ikan nasional;
2. pertumbuhan populasi penduduk dan permintaan produk perikanan dalam negeri;
3. pengelolaan perikanan secara terukur berbasis WPPNRI;
4. potensi lahan budi daya yang masih besar dan belum termanfaatkan secara optimal;
5. pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil;
6. internet dan teknologi informasi;
7. ekonomi sirkuler kelautan dan perikanan;
8. sumber daya ikan, habitat, dan produksi;
9. komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan;

10. penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan;
11. ketersediaan bahan baku untuk industri perikanan; dan
12. pengelolaan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. kontribusi sektor kelautan dan perikanan masih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
2. tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan; dan
3. Indonesia negara kepulauan yang belum didukung dengan koneksi hulu hilir yang baik.

Faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang, antara lain:

1. permintaan hasil perikanan dunia yang terus meningkat;
2. kerja sama bilateral, regional, multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMOs);
3. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia; dan
4. peningkatan jumlah penduduk dunia.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi ancaman, antara lain:

1. globalisasi perdagangan dan pasar bebas hasil perikanan regional serta dunia;
2. praktik *IUU Fishing*;
3. beberapa ketentuan *World Trade Organization* (WTO) yang memberatkan negara berkembang;
4. pandemi COVID-19 dan resesi global;
5. perubahan iklim; dan
6. hambatan nontarif dalam perdagangan produk kelautan dan perikanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka Visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Pengelolaan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “RB KKP yang berkualitas”.

C. Tujuan

Dalam rangka menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, terdiri atas:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” dengan tujuan meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan;
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
 - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budi daya dan perikanan tangkap;
 - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatnya sistem pengawasan pengendalian mutu, keamanan hasil kelautan dan perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan Kelautan dan Perikanan di pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja RB KKP.

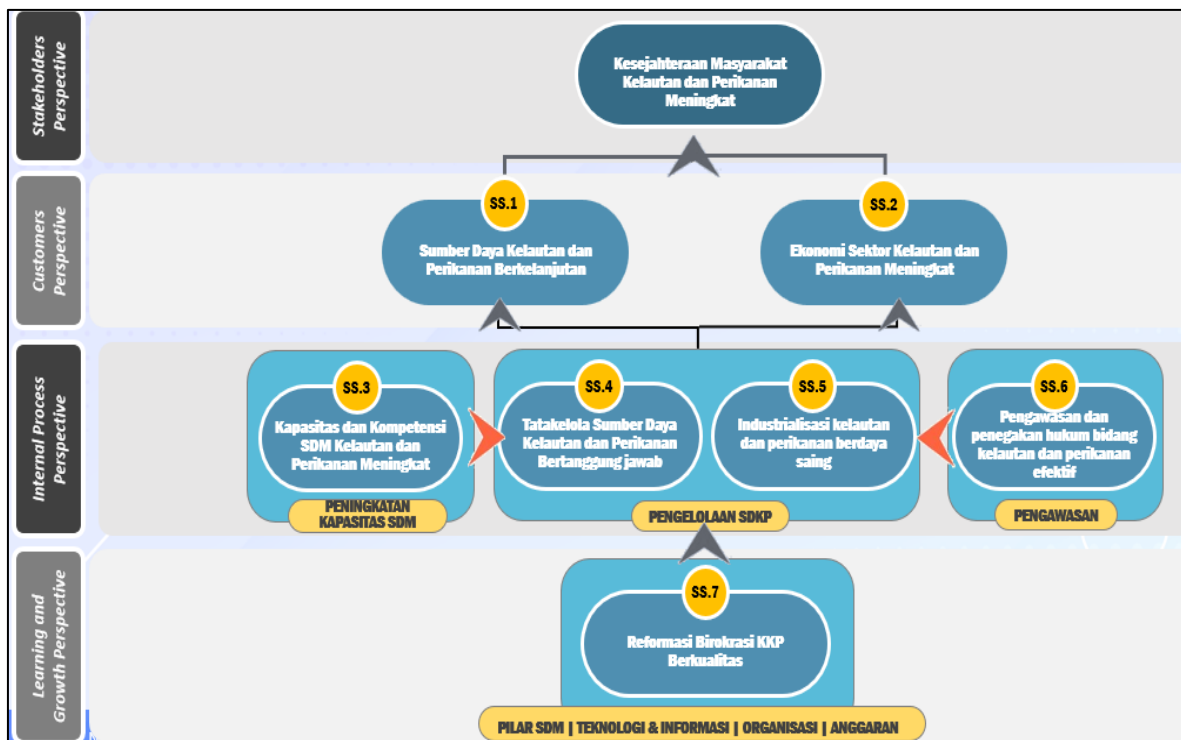
D. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Tujuan akhir (*ultimate goal*) Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Meningkat. Adapun sasaran strategis (SS) dari pembangunan kelautan dan perikanan periode Tahun 2020-2024 adalah:

- SS-1 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan;
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat;

- SS-3 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat;
- SS-4 Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab;
- SS-5 Industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing;
- SS-6 Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif; dan
- SS-7 RB KKP yang berkualitas.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan prinsip *balanced score card* melalui empat strategi/perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Sasaran strategis kesatu SS-1 yang akan dicapai yaitu “Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

1. proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman; dan
2. luas kawasan konservasi perairan.

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai yaitu “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

1. pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan;
2. nilai ekspor hasil perikanan; dan
3. konsumsi ikan.

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja persentase lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap DUDI.

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai yaitu “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan indikator kinerja:

1. WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur; dan
2. penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir.

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai yaitu “Industrialisasi Sektor KP yang berdaya saing dan berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

1. produksi perikanan;
2. produksi garam;
3. persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; dan
4. dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai yaitu “Pengawasan dan penegakan hukum bidang KP efektif”, dengan indikator kinerja persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP melalui Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yaitu RB KKP yang berkualitas” dengan indikator kinerja:

1. indeks kinerja RB KKP (Indeks); dan
2. nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerja bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat dengan ukuran keberhasilan yaitu IKMKP. Target IKMKP tahun 2024 sebesar 63,87 telah menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang diukur menggunakan dimensi ekonomi dan sosial.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada gambar di bawah ini.



Dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024, telah disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas

pembangunan. *Major Project* dimana KKP sebagai salah satu pelaksana utama yaitu revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng, integrasi pelabuhan perikanan dan pasar ikan bertaraf internasional, dan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. *Major Project* KKP

No	<i>Major Project</i>	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1.	Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan budi daya (ikan menjadi 10,32 juta ton) • Meningkatnya pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun 	<p style="text-align: center;">25 (APBN: 3,3; Swasta: 21,7)</p>	KKP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah, Badan Usaha (BUMN/Swas ta)
2.	Integrasi Pelabuhan Perikanan dan <i>Fish Market</i> Bertaraf Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 juta ton pada tahun 2024 • Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8,0 miliar pada tahun 2024 	<p style="text-align: center;">30 (APBN: 7,2; KPBU dan Swasta: 22,8)</p>	KKP, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustri- an, Pemerintah Daerah, Badan Usaha (BUMN/Swas ta)

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
3.	Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pendapatan petani rata-rata 5% per tahun dan pendapatan nelayan rata-rata 10% per tahun (target SDGs) • Meningkatnya produktivitas komoditas 5% per tahun 	226,4 (APBN: 200,9; Swasta: 25,5)	Kementerian Pertanian, KKP, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Badan Usaha (BUMN/Swasta)

Selain itu, KKP juga mendukung *Major Project* lainnya antara lain pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas. Dalam pelaksanaannya, *Major Project* dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan, serta direktif Presiden.

Pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) dilakukan bersinergi antara KKP dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan pemerintah daerah dan badan usaha (BUMN/Swasta).

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP, antara lain:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, yang meliputi peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, memperkuat komitmen pelaksanaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke-14 yakni ekosistem lautan (*Life Below Water*), dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, industrialisasi;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan strategi penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada

sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan/Strategis Nasional Tertentu (PKSN/T), sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau budi daya (Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019), dan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) atau WPPNRI. Pada tahun 2020 terdapat tiga belas SKPT yaitu SKPT Natuna, SKPT Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Saumlaki, SKPT Sabang, SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, SKPT Mentawai, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Moa, SKPT Biak, dan SKPT Timika;

3. meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang meliputi pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan serta percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gemarikan;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan melalui perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan strategi konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir, perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan, dan pengembangan rendah karbon pesisir dan laut; dan
6. memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik melalui penguatan keamanan laut, pembangunan dan operasional armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju, serta turut serta dalam mewujudkan keberlangsungan dan keseimbangan ekosistem serta keanekaragaman hayati yang terjaga dan berkelanjutan. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan prioritas nasional sebagaimana tersebut di atas.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan program prioritas KKP. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 dan pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs, KKP menempatkan ekologi sebagai panglima guna mendukung lompatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (ekonomi biru) yang dapat terus dirasakan manfaatnya oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Penerapan konsep ekonomi biru tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan sumber daya yang memberikan nilai tambah. Selain itu, ekonomi biru juga diyakini mampu mendorong pengelolaan perikanan secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi. Untuk itu dibutuhkan penyediaan akses internet, teknologi informasi, dan instrumen pengawasan berbasis satelit yang dapat memonitor perubahan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan sensor bawah laut yang dapat mengirimkan data-data hasil observasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah dan kebijakan KKP tahun 2020-2024 menjadi:

1. penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tata kelola perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, peningkatan nilai tambah serta pengelolaan sistem logistik yang efisien untuk meningkatkan

- investasi, perluasan pasar dalam negeri dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 5. penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP juga menerapkan RB yang berkualitas yang dilakukan oleh seluruh unit organisasi di pusat dan daerah. Disamping itu, perlu adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang diutamakan untuk memenuhi kebutuhan program KKP secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU). Salah satu prinsip BLU yaitu menghasilkan barang/jasa tanpa mengutamakan pencarian keuntungan melalui suatu fleksibilitas pengelolaan keuangan dan keleluasaan menerapkan praktik bisnis yang sehat. KKP juga melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital.

Strategi pelaksanaan arah kebijakan, terdiri dari:

1. arah kebijakan “Penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan yang dilakukan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
 - a. membuka komunikasi dengan *stakeholders* untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi, dan pengetahuan yang faktual;

- b. optimalisasi pengelolaan SDI berbasis kuota dan zonasi, termasuk optimalisasi kelembagaan WPPNRI;
- c. penguatan penyediaan dan pemanfaatan data stok SDI sebagai basis pengelolaan SDI yang maju dan berkelanjutan;
- d. perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait;
- e. pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (*eco fishing port*), dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*), dengan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- f. eksplorasi perikanan di ZEEI dan laut lepas;
- g. fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, serta optimalisasi peran BLU-LPMUKP/Bank Nelayan;
- h. peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, dan perlindungan HAM Perikanan;
- i. penguatan kelompok usaha bersama melalui pembentukan korporasi nelayan (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, BUMN, pemerintah daerah, dan swasta;
- j. pengelolaan perikanan di perairan umum;
- k. pengembangan armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- l. partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan Indonesia (RFMOs);

- m. pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumber daya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital;
 - n. pengembangan SKPT;
 - o. penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) perikanan tangkap;
 - p. modeling penangkapan ikan terukur;
 - q. pengembangan Kampung Nelayan Maju dan Kampung Nelayan Modern (Kalamo); dan
 - r. peningkatan operasi pengawasan di zona penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
2. Arah kebijakan “pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan dan memperkuat tatakelola perikanan budi daya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat” dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. pembangunan/revitalisasi tambak udang dan bandeng (*Major Project RPJMN 2020-2024*), berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha/swasta;
 - b. pengembangan komoditas perikanan budi daya yang memiliki nilai ekonomis penting di semua tipologi ekosistem yaitu laut, payau, dan tawar untuk pemenuhan konsumsi domestik, sumber devisa negara melalui ekspor, dan keberlanjutan lingkungan. Komoditas utama antara lain udang, rumput laut, nila, kepiting, dan lobster;
 - c. pengembangan modeling budi daya ikan/udang/rumput laut berbasis kawasan yang berkelanjutan dan didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan modern di lokasi sentra budi daya dan lokasi potensial lainnya;
 - d. pengembangan pakan ikan mandiri yang terdiri dari pakan buatan yang diutamakan menggunakan bahan baku lokal dan pakan alami;

- e. pengembangan sistem perbenihan ikan nasional melalui penguatan jejaring atau sistem logistik perbenihan nasional, pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana balai benih ikan, unit perbenihan ikan di masyarakat, dan broodstock center, serta modernisasi teknologi;
- f. pengembangan kawasan kluster usaha budi daya ikan yang berkelanjutan termasuk kampung perikanan budi daya dan SKPT didukung dengan manajemen pengelolaan yang terintegrasi dan *modern*;
- g. pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan kawasan perikanan budi daya yang dilakukan antara lain melalui *surveillance* hama dan penyakit ikan, pengujian residu produk perikanan budi daya, modernisasi sarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. pembinaan, penyiapan dan pelaksanaan sertifikasi perikanan budi daya di bidang pembesaran, pembenihan, dan pakan;
- i. pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budi daya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi, instalasi listrik, dan keramba jaring apung;
- j. peningkatan kerja sama dan sinergitas kebijakan, program, anggaran, dan data perikanan budi daya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta lintas sektoral di tingkat nasional maupun internasional;
- k. penguatan kelembagaan dan pemberdayaan pembudi daya ikan melalui pembentukan pokdakan dan koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip korporasi dengan fasilitasi pemberian stimulus usaha, fasilitasi skema pembiayaan yang murah dan mudah, sertifikasi lahan, asuransi usaha perikanan budi daya, serta pendampingan teknis;
- l. penguatan prasarana dan sarana serta kelembagaan UPT perikanan budi daya untuk peningkatan layanan kepada masyarakat serta peningkatan PNBP;

- m. pengembangan sentra/kampung perikanan budi daya melalui penguatan kelembagaan, prasarana dan sarana budi daya yang didukung pendanaan pusat/daerah;
 - n. penguatan prasarana dan sarana usaha budi daya melalui penyaluran bantuan pemerintah bagi kelompok pembudi daya atau kelompok masyarakat;
 - o. penguatan sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis perikanan budi daya bagi masyarakat/*stakeholder* perikanan budi daya; dan
 - p. penguatan tata kelola dan regulasi pengembangan komoditas untuk penerimaan negara.
3. arah kebijakan “Pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui penyediaan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan”, dilaksanakan dengan strategi, antara lain:
- a. peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas unit pengolahan ikan/udang, rumput laut serta komoditas perikanan lainnya;
 - b. perumusan dan penerapan standar, harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan, penerapan standardisasi mutu, sertifikasi, dan ketelusuran produk (*traceability*) dalam rangka meningkatkan *quality assurance*, pengelolaan ketelusuran (*traceability*), jaminan mutu, dan keamanan produk kelautan dan perikanan;
 - c. pengelolaan logistik ikan nasional antara lain melalui pemetaan dan pemantauan logistik, penataan rantai pasok dalam koridor logistik, penguatan sistem logistik ikan yang efisien, penyediaan dan pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka pengadaan, penyimpanan, distribusi dan transportasi hasil perikanan;

- d. pelaksanaan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk penanggulangan gizi buruk dan penanganan *stunting*;
- e. perluasan akses pasar dalam dan luar negeri melalui pengembangan Sistem Informasi pasar berbasis digital, keikutsertaan pameran, penguatan branding, pemetaan pasar serta meningkatkan kerja sama ekonomi yang dapat meningkatkan pasar ke negara tujuan;
- f. penyediaan, pembinaan dan pengelolaan, pasar ikan skala internasional (*Major Project RPJMN 2020-2024*) dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan badan usaha;
- g. peningkatan partisipasi daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan dan optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG);
- h. pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah produk olahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) termasuk penerapan prinsip *zero waste*;
- i. peningkatan ragam baru (diversifikasi) produk hasil kelautan dan perikanan, hilirisasi produk rumput laut, dan sumber daya alam laut bernilai tambah;
- j. fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan
- k. penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan usaha;
- l. peningkatan kapasitas dan pemenuhan prasarana dan sarana laboratorium dan/atau lembaga inspeksi untuk pengujian mutu;
- m. penguatan laboratorium acuan penyakit ikan dan mutu hasil perikanan, serta jejaring laboratorium keamanan pangan hasil perikanan;
- n. peningkatan layanan sertifikasi ekspor/impor/domestik berbasis elektronik serta inovasi pelayanan publik serta perizinan berusaha di bidang mutu dan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;

- o. penguatan pelaku usaha pengolahan, pemasaran, dan logistik produk kelautan dan perikanan;
 - p. pengelolaan kebijakan pemasukan hasil perikanan serta neraca komoditas;
 - q. fasilitasi kemudahan pelaku usaha untuk berinvestasi, mengakses pembiayaan, teknologi dan pasar serta didukung regulasi yang kondusif;
 - r. pengembangan SKPT;
 - s. pengawasan pengolahan dan distribusi hasil perikanan serta penanganan importasi ilegal produk kelautan dan perikanan; dan
 - t. penguatan UPT dan satuan kerja yang membidangi pengendalian dan pengawasan mutu serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
4. arah kebijakan “Pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui perluasan kawasan konservasi perairan, penyelenggaraan penataan ruang laut, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, rehabilitasi pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di pesisir dan laut, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
 - b. perbaikan dan peningkatan kualitas ekosistem pesisir yang rusak melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. penanganan pencemaran laut dan sampah plastik di pesisir dan laut;
 - d. peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, perluasan kawasan konservasi laut, pemanfaatan kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan, rehabilitasi *mangrove* dan terumbu karang;

- e. peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan;
- f. penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran KKP dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati perairan;
- g. peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar;
- h. peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam;
- i. pengelolaan kawasan wisata bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
- j. peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi;
- k. pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- l. pemanfaatan air laut, pengelolaan biofarmakologi, dan peningkatan pemanfaatan *marine bioproduct* dan bioteknologi;
- m. penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut;
- n. pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk menjaga ekologi laut;
- o. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir berkelanjutan melalui upaya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon pesisir dan laut;
- p. penyelesaian perencanaan ruang laut meliputi rencana zonasi kawasan laut, rencana zonasi wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, rencana aksi dan peninjauan kembali, serta penyelarasannya dengan rencana tata ruang;
- q. akselerasi pengendalian pemanfaatan ruang laut dan pulau-pulau kecil serta perairan di sekitarnya antara lain melalui pelaksanaan perizinan lokasi perairan dan penyelenggaraan kadaster laut;
- r. peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana, kelembagaan dan aparaturnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk penambahan sarana kapal pengawas dan *speedboat* pengawas;

- s. peningkatan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis teknologi;
 - t. peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - u. kerja sama dan sinergi penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan lintas instansi (TNI AL, POLRI, Bakamla, Kejaksaan Agung, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya);
 - v. peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - w. operasional pengawasan ekspor, impor, dan domestik;
 - x. peningkatan prasarana dan sarana, kelembagaan pengawasan SDKP, dan laboratorium uji (*reference* dan *destructive fishing*);
 - y. pengembangan SKPT; dan
 - z. peningkatan UPT pengelolaan ruang laut dan UPT pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
5. arah kebijakan “Penguatan sumber daya manusia pelaku utama dan pelaku usaha serta aparatur kelautan dan perikanan” dilaksanakan dengan strategi antara lain:
- a. pengembangan kurikulum pendidikan vokasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan *teaching factory* dan memperkuat *link and match* berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, serta menumbuhkan wirausaha baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan sistem pelatihan berbasis SKKNI dan standar internasional melalui penerapan Konvensi STCW-F 1995;
 - c. pengembangan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang kelautan dan perikanan;
 - d. perluasan jangkauan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*);
 - e. pengembangan kelembagaan pendidikan dan vokasi menuju *single institute* yaitu *Ocean Institute of Indonesia*;

- f. pengembangan kelembagaan pelatihan kelautan dan perikanan;
- g. penguatan sistem penyuluhan serta penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- h. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional, termasuk peningkatan kapasitas tenaga peneliti, pendidik, pelatih, dan penyuluh;
- i. peningkatan kerja sama dan sinergitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan dengan lembaga nasional dan internasional; dan
- j. peningkatan kapasitas UPT pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kelima arah kebijakan KKP tersebut diperkuat dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan melalui penerimaan peserta didik baru dari Anak Pelaku Utama (APU) sebanyak 100 persen dan penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui *single institute* yaitu *Ocean Institute of Indonesia* yang mengedepankan fleksibilitas dan inovasi pendidikan yang didukung penguatan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu peningkatan profesionalisme ASN, penguatan penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas laporan Keuangan KKP, peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP KKP, serta penguatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal.

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan PNBPN sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBPN Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA, dan Badan Layanan

Umum (BLU) KKP. Peningkatan PNBPN pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka percepatan implementasi arah kebijakan mendukung RPJMN, dan ekonomi biru tersebut, maka KKP perlu melakukan peningkatan teknologi untuk memperluas pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi seperti, pemanfaatan informasi berupa citra satelit yang didapat dari pengamatan satelit bumi. Pemanfaatan satelit bumi ini juga dapat dimanfaatkan secara luas untuk pemetaan tambak aktif dan tidak aktif, waktu panen tambak (produksi), pemetaan hutan bakau, pemetaan terumbu karang maupun degradasi garis pantai. Basis data yang memadai akan membantu KKP dalam mengembangkan pembuatan kebijakan berbasis bukti digital.

Dalam rangka percepatan implementasi arah kebijakan mendukung RPJMN, dan ekonomi biru tersebut, maka KKP perlu melakukan peningkatan teknologi untuk memperluas pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi seperti, pemanfaatan informasi berupa citra satelit yang didapat dari pengamatan satelit bumi. Pemanfaatan satelit bumi ini juga dapat dimanfaatkan secara luas untuk pemetaan tambak aktif dan tidak aktif, waktu panen tambak (produksi), pemetaan hutan bakau, pemetaan terumbu karang maupun degradasi garis pantai. Basis data yang memadai akan membantu KKP dalam mengembangkan pembuatan kebijakan berbasis bukti digital.

Disamping kontribusi terhadap RPJMN dan kebijakan ekonomi biru, KKP juga berkontribusi pada target keanekaragaman hayati dan perubahan iklim nasional Indonesia yang ditetapkan melalui Kebijakan Kelautan Nasional, Visi Kawasan Konservasi 2030, komitmen

internasional (seperti, SDG 14, *Coral Triangle Initiative*, *Convention on Biological Diversity*, dan *International Coral Reef Initiative*), dan implementasi *Indonesia Enhanced Nationally Determined Contribution Actions*, seperti perlindungan Kawasan Konservasi dan peningkatan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir.

Sejalan dengan kebijakan ekonomi biru, penambahan luas kawasan konservasi harus diikuti dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sehingga dapat memberikan hasil biofisik dan sosial ekonomi yang ditargetkan, meningkatkan integrasi kawasan konservasi ke dalam pengelolaan perikanan dan ekosistem yang lebih luas, meningkatkan peluang mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi, dan mengatasi kesenjangan pembiayaan bagi investasi proyek dan keberlanjutan hasil. Dengan pertimbangan tersebut maka selain meningkatkan proporsi luasan kawasan konservasi, elemen penting lain dari keberadaan kawasan konservasi yaitu meningkatkan kemanfaatannya bagi lingkungan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, meliputi:

1. tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. gender;
3. modal sosial budaya; dan
4. transformasi digital.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 KKP tersebut mengacu pada RPJMN 2020-2024 sebagai bentuk pembangunan inovatif adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Kebijakan pengarusutamaan ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara *inklusif*. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan

efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni ekosistem lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar SDI tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budi daya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum

internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).

KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), TPB nomor 2, TPB nomor 8, TPB nomor 15, TPB nomor 17, dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2. Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan dalam percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat PUG, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit organisasi eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender;
- f. keberpihakan terhadap pemenuhan hak anak dan kelompok rentan sektor kelautan dan perikanan; dan
- g. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender di antaranya bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budi daya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, di antaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan

- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, prasarana dan sarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

C. Kerangka Regulasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024 sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, perlu disusun kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara.

Kerangka regulasi diarahkan sebagai *tools of social engineering* sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh KKP dalam rangka pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024. Penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan baik sebagai tindak lanjut dari atribusi undang-undang sektor kelautan dan perikanan maupun sebagai bentuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan kewenangan KKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaksanaan atribusi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, KKP berperan aktif dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Di samping itu, untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan PNBP yang Berlaku Pada KKP. Termasuk menyelesaikan berbagai peraturan turunan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah dimaksud.

Sebagai pemenuhan asas *rechtmatigheid* dan *doelmatigheid* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menunjang program prioritas KKP, telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, beserta aturan tindak lanjutnya, yang dalam proses pembentukannya telah memenuhi aspek *meaningful participation* dengan menghadirkan dan memberi kesempatan para pihak untuk memberikan masukan.

Secara terinci rencana kerangka regulasi tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat kementerian/ lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Penguatan kapasitas kelembagaan KKP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

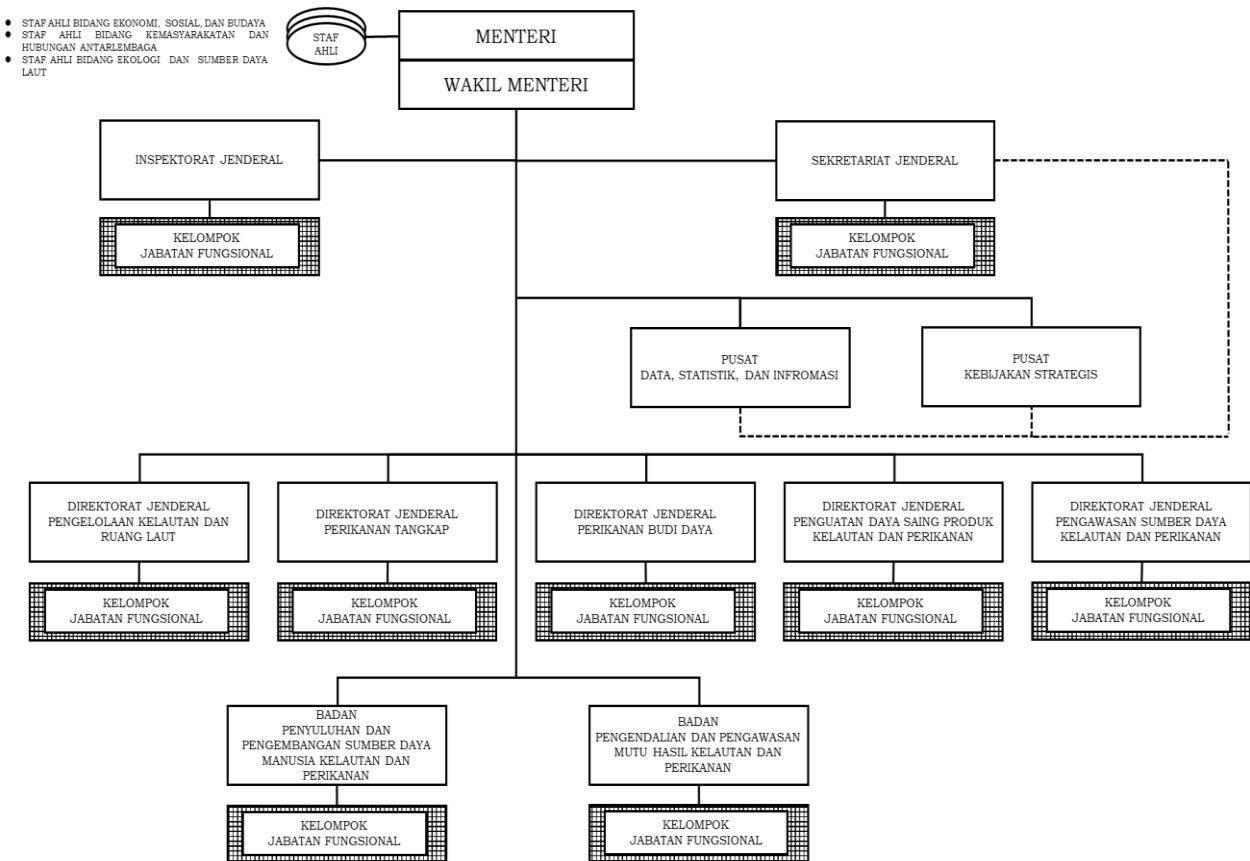
1. mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan; dan
4. tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Kerangka kelembagaan dalam perencanaan strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat intern maupun antarorganisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Kelembagaan yang dikembangkan harus tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang menekankan nilai *structure follow strategy*, dan diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan, diantaranya adalah mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Untuk melaksanakan program dan kebijakan pembangunan KKP 2020-2024 diperlukan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan KKP akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. Disamping itu akan dilakukan penataan kelembagaan UPT di KKP.

Penataan kelembagaan KKP selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian dan *redesign* nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti dengan penguatan kapasitas SDM, terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di KKP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan fungsi yaitu dengan dialihkannya fungsi riset kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional dan fungsi karantina ke Badan Karantina Indonesia. Dengan beralihnya fungsi tersebut, KKP perlu melakukan penataan kelembagaan pada unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia serta Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya penataan kelembagaan pada unit organisasi KKP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan struktur organisasi eselon I dan Pusat sebagai berikut:



BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Utama 2020-2024

Sasaran Strategis yang ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/ impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP (semula) sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP (menjadi) sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 2. Kinerja Sasaran Strategis (semula)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>						
SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat						
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87
	a. Nilai Tukar Nelayan	102,00	103,00	105,00	106,00	107,00
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75
	d. Nilai Tukar Petambak Garam	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75
<i>CUSTOMERS PERSPECTIVE</i>						
SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	7,90	8,11	8,31	8,51	8,71
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05
SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan						

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
<i>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</i>						
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤64%	≤67%	≤72%	≤76%	≤80%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	23,4	24,2	25,1	26,0	26,9
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						
SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat						
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75
SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan						
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15
SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab						
9	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	3	5	7	9	11
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12 (10 2 Kumulati
11	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	94	95	96	97	98
SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing						
12	Produksi perikanan (juta ton)	26,46	27,89	29,42	31,01	32,75
	a. Perikanan Tangkap	8,0	8,42	8,88	9,43	10,10
	b. Perikanan Budi Daya	18,44	19,47	20,54	21,58	22,65
	- Ikan	7,4	7,92	8,69	9,48	10,32
	- Rumput Laut	10,99	11,55	11,85	12,10	12,33

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE						
13	Produksi garam (juta ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan integrative						
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	54	60	65	70	75
15	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE						
SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik						
16	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	71	72	73	74	75
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan	88	89	89	90	90

Tabel 3. Kinerja Sasaran Strategis (menjadi)

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE							
Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat (NTN =108, NTPi = 105, Target Tahun 2024)							
CUSTOMERS PERSPECTIVE							
SS-1. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan							
IKU.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	-	-	-	-	≤80	≤80

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)
IKU.2	Luas kawasan konservasi perairan (Juta ha)	-	-	-	-	26,0	29,3
SS-2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat							
IKU.3	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	-	-	-	-	8,71	5-7
IKU.4	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	-	-	-	-	8,0	7,2
IKU.5	Konsumsi ikan	-	-	-	-	62,05	59,00
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>							
SS-3. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat							
IKU.6	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap DUDI (%)	-	-	-	-	75	72
SS-4. Tata Kelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab							
IKU.7	WPPNRI yang melaksanakan Penangkapan Ikan Terukur (WPP)	-	-	-	-	11	11
IKU.8	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	-	-	-	-	12 (102 Kumulatif)	21
SS-5. Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing							
IKU.9	Produksi	-	-	-	-	32,75	30,85
	a. Perikanan	-	-	-	-	10,10	6
	b. Perikanan	-	-	-	-	21,58	24,85
	1) Ikan	-	-	-	-	9,48	12,52
	2) Rumput Laut	-	-	-	-	12,10	12,33

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2020	2021	2022	2023	2024 (semula)	2024 (menjadi)
IKU.10	Produksi garam (Juta Ton)	-	-	-	-	3,4	2
IKU.11	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	70,00
IKU.12	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil (Triliun Rupiah)	-	-	-	-	5,94	10,73
SS-6. Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan							
IKU.13	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	-	-	-	-	98	98
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE							
SS-7. RB KKP yang berkualitas							
IKU.14	Indeks RB KKP (Indeks)	-	-	-	-	75	80
IKU.15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)	-	-	-	-	90	93,76

B. Indikator Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan indikator kinerja program

dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi kementerian/lembaga setingkat eselon I.

Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran kementerian/lembaga dengan tujuan:

1. memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program kementerian/lembaga;
2. memastikan pelaksanaan seluruh prioritas nasional dan *Major Project* terakomodasi dalam program-kegiatan-*output* kementerian/lembaga;
3. memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu kementerian/lembaga; dan
4. memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit organisasi eselon I dalam satu kementerian/lembaga, maupun program lintas kementerian/lembaga).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit organisasi eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga. Program dapat bersifat lintas unit organisasi eselon I dalam satu kementerian/lembaga atau bersifat lintas kementerian/lembaga. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit organisasi eselon I atau lintas kementerian/lembaga dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja

di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi kementerian/lembaga setingkat eselon II.

D. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN, APBD, dan DAK), swasta, perbankan dan nonperbankan, masyarakat, dunia usaha, serta sumber pendanaan lain yang sah. Adapun penguatan sinergi pendanaan antara KKP, kementerian/lembaga terkait serta APBD terus diintensifkan. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan atau lembaga pengelola dana bergulir lainnya. Selain itu juga dilakukan langkah-langkah mendorong inovasi skema pembiayaan (*innovative financing*) antara lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Blended Finance*, *Green Finance*, *Blue Finance* transfer/hibah ke daerah, *Grant Budget Support Aids*, Kreditor Swasta Asing (KSA), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan lain-lain. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan KKP juga melakukan sinergi melalui penerimaan hibah barang/jasa yang diperoleh melalui kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional.

Kerangka indikasi pendanaan KKP tahun 2020-2024 secara terinci disusun dalam kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 untuk Kerangka Pendanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 (semula) dan Tabel 6 untuk Kerangka Pendanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 (menjadi).

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan KKP 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada arah pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemi global Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020.

BAB V PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024, maka Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, yang disusun untuk menjabarkan RPJMN tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Revisi Rencana Strategis KKP tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja KKP dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra KKP tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. KERANGKA REGULASI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

A. Rancangan Undang-Undang

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Undang-Undang tentang Landas Kontinen	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian ESDM	2021	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen
2.	Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian	2024	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3.	Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan	2024	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

B. Rancangan Peraturan Pemerintah

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2024	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
2.	Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Mandat dari Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk	Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara	2021	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			
3.	Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur	Peraturan Pemerintah ini disusun untuk mencapai pengelolaan perikanan yang optimal dan berkelanjutan, serta menjamin kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian	2023	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja				
4.	Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tersebut dilakukan untuk keterpeliharaan daya dukung ekosistem laut serta untuk meningkatkan kebersihan laut, sehingga diperlukan pengendalian proses-proses alami yang mengganggu pengelolaan sumber	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Hidro-Oceanografi	2023	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

NO.	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
		daya kelautan melalui pengaturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut				

C. Rancangan Peraturan Presiden

NO	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	Mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.	2020-2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. 2. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa. 3. Peraturan Presiden Nomor 4

NO .	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi. 4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini. 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan

NO .	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
						Antarwilayah Teluk Bone. 6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku. 7. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna- Natuna Utara. 8. Peraturan Presiden Nomor 29

NO .	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
						<p>Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Flores.</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Malaka.</p>
2.	Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan <i>Illegal, Unreported, and</i>	Rekomendasi dari <i>International Plan of Action IUU Fishing</i> , dan Rencana Aksi ini dalam pelaksanaannya melibatkan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian	2024	

NO .	JUDUL RANCANGAN	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT/INSTITUSI TERKAIT	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
	<i>Unregulated Fishing (IUU Fishing)</i>	Kementerian/Lembaga terkait		Sekretariat Negara, TNI AL, POLRI, Badan Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung		

Tabel 5. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024 (semula)

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	TOTAL KKP						6.448,7	7.732,9	8.786,2	9.467,6	10.166,1	42.601,5
SS-1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat											
	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) (Nilai)	59,16	60,31	61,47	62,66	63,87						
SS-2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat											
	a. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Perikanan (%)	7,9	8,11	8,31	8,51	8,71						
	b. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	8,00						
	c. Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
SS-3	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan											
	a. Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤ 64	≤ 67	≤ 72	≤ 76	≤ 80						
	b. Luas kawasan konservasi perairan (Juta ha)	23,4	24,2	25,1	26	26,9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS-4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat											
	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	60	62	65	70	75						
SS-5	Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan											
	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8	11	13	15						
SS-6	Tatakelola SD kelautan dan perikanan bertanggung jawab											
	a. WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola	3	5	7	9	11						
	b. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	14	24	26	26	12 (102 Kumulatif)						
	c. Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	94	95	96	97	98						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen							3.210,2	3.440,9	3.760,1	4.054,2	4.333,8	18.799,2
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Sekretariat Jenderal											
	a. Nilai PMPRB Setjen (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Nilai SAKIP KKP (Nilai)	A (82,5)	A (83)	A (83,5)	A (84)	A (85)						
	c. Nilai PM SAKIP Setjen (Nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	d. Nilai SPBE KKP (Nilai)	3,6	3,7	3,8	3,9	4						
	e. Opini BPK atas LK KKP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	f. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Setjen dibandingkan Realisasi Anggaran Setjen (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	g. Level Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal (Level)	3	3	3	3	3						
	h. Indeks Kematangan UKPBJ KKP (Indeks)	7	9	9	9	9						
	i. Nilai pengawasan kearsipan lingkup KKP (Nilai)	83	83,5	84	84,5	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Indeks Sistem Merit KKP (Indeks)	0,65	0,7	0,8	0,83	0,85						
	k. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Setjen (Indeks)	72	73	74	75	76						
	l. Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	1	1	2	2	2						
	m. Persentase Penyelesaian Regulasi Lingkup KKP (%)	100	100	100	100	100						
	n. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Terhadap Total Pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan (%)	<15	<14	<13	<12	<11						
	o. Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit)	1	1	1	1	1						
	p. Unit Kerja Setjen yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	q. Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perbaikan Kinerja Setjen (%)											
	r. Indeks Pengelolaan Asset KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	s. Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	t. Indeks Perencanaan KKP (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	u. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setjen (Nilai)	88	89	89	90	90						
	v. Nilai Kinerja Anggaran Setjen (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup KKP dan Inspektorat Jenderal											
	a. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat efektivitas pengawasan terhadap	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan BMN Lingkup KKP (%)											
	d. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Evaluasi atas Implementasi (Pengungkit) Reformasi Birokrasi KKP (Nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas SPIP KKP (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Nilai PM SAKIP KKP (Nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Unit Kerja KKP yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit)	42	49	56	63	70						
	i. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (Indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	j. Level Kapabilitas Internal Audit (IACM) Inspektorat Jenderal (Level)	3	3	3	3	4						
	k. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan (Rekomendasi)	18	18	18	18	18							
	m. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat Jenderal (%)	85	86	87	88	89							
	n. Persentase Unit Kerja Itjen yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90							
	o. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Itjen (Indeks)	72	73	74	75	76							
	p. Nilai IKPA Itjen (Nilai)	88	89	89	90	90							
	q. Nilai NKA Itjen (Nilai)	85	86	87	88	89							
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap												-
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	30	31	32	33	34							
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari	8	9	10	11	12							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Unit Kerja)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan publik Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Unit)	6	7	8	9	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)											
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya	4	5	6	7	8						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelautan dan Perikanan (Unit)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PSDKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Nilai)	87	87,15	87,25	87,5	87,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produk Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Unit)	2	3	3	4	5						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Indeks)	72	73	74	75	76						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja)											
	j. Nilai IKPA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Unit)	6	7	8	9	10						
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengelolaan Ruang Laut dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)											
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	f. Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan	6	7	8	9	10						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keamanan Hasil Perikanan (Unit)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan realisasi anggaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	f. Level Maturitas SPIP Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Nilai IKPA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Nilai)	85	86	87	88	89						
	l. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Indeks)	3,54	3,56	3,58	3,6	3,62						
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan											
	a. Nilai PMPRB Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Badan Riset Sumber Daya	9	10	11	12	13						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Manusia Kelautan dan Perikanan (Unit)											
	c. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dibandingkan realisasi Anggaran Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Indeks)	72	73	74	75	76						
	e. Nilai PM SAKIP Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Nilai)	86,00	86,15	86,25	86,50	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Level)	3	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	g. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Badan Riset Sumber Daya Manusia	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelautan dan Perikanan (Nilai)												
	Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP						15,5	17,5	20,5	23,5	26,5	103,5	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro Hukum dan Organisasi KKP												
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Hukum dan Organisasi (Nilai)	9,94	10,08	10,22	10,36	10,50							
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hukum dan Organisasi (Indeks)	72	73	74	75	76							
	Layanan Hukum (layanan)							13,6	15,4	16,8	18,2	76,4	
	a. Peraturan Perundang- undangan Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budi Daya, Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Sumber Daya Manusia	30	32	34	36	38							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelautan dan Perikanan yang tersusun (Peraturan)												
	b. Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan, Pengawasan Internal, Pengelolaan Ruang Laut, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang tersusun (Peraturan)	52	54	56	58	60							
	c. Penanganan Masalah Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	56	50	50	44	44							
	Layanan Manajemen Organisasi (Layanan)						1,8	2,2	2,8	3,6	4,4	14,8	
	Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan KKP (Dokumen)	11	11	11	11	11							
	Layanan Reformasi Birokrasi (Layanan)						1,3	1,7	2,3	3,1	3,9	12,3	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP (Dokumen)	4	4	4	4	4							
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur							14,8	16,8	19,8	22,8	25,8	100,0	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Biro SDMA												
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang Menjadi Tanggungjawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (nilai)	7,81	7,92	8,03	8,14	8,25							
	b. Indeks Sistem Merit (Indeks)	0,65	0,70	0,80	0,83	0,85							
	c. Nilai PMPRB Sekretariat Jenderal (Nilai)	30	31	32	33	34							
	d. Indeks Profesionalitas ASN KKP	72	73	74	75	76							
	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (layanan)						14,8	16,8	19,8	22,8	25,8	100,0	
	a. Layanan Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai (Dokumen)	12	12	12	12	12							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian Pensiun, dan Mutasi (Dokumen)	10	10	10	10	10						
	c. Layanan Pengembangan, Pengelolaan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional (Dokumen)	5	5	5	5	5						
	d. Layanan Manajemen Kinerja Individu, Informasi, dan Ketatausahaan (Dokumen)	18	18	18	18	18						
Pengelolaan Keuangan KKP							21,0	23,0	26,0	29,0	32,0	131,0
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Keuangan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Keuangan (Nilai)	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75						
	b. Indeks pengelolaan keuangan (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	c. Indeks pengelolaan asset (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Keuangan (Indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Manajemen Keuangan (layanan)						21,0	23,0	26,0	29,0	32,0	131,0
	a. Tingkat Kepatuhan Terhadap SPI (%)	100	100	100	100	100						
	b. Tingkat Ketaatan Terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (%)	100	100	100	100	100						
	c. Kecukupan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan KKP (%)	100	100	100	100	100						
	d. Kecukupan Informasi Pelaksanaan Anggaran KKP (%)	100	100	100	100	100						
	Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja sama Antarlembaga						48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	267,5
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Perencanaan											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi Tanggung Jawab Biro Perencanaan (Nilai)	13,67	13,86	14,05	14,25	14,44						
	b. Indeks Perencanaan (Indeks)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Nilai SAKIP KKP (Nilai)	82,04	82,5	83	83,5	84						
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Perencanaan (Indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Perencanaan (Layanan)						48,3	50,3	53,3	56,3	59,3	267,5
	Terlaksananya Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja Sama Antarlembaga (%)	100	100	100	100	100						
	Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa						252,6	269,3	275,6	283,0	291,9	1.372,4
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang Menjadi Tanggung Jawab Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	1,42	1,44	1,46	1,48	1,5						
	b. Indeks kematangan UKPBJ (Indeks)	7	9	9	9	9						
	c. Nilai Pengawasan Kearsipan lingkup KKP (Nilai)	83	83,5	84	84,5	85						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	d. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	72	73	74	75	76							
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (layanan)						19,6	24,6	25,6	27,1	29,1	126,0	
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100	100	100	100	100							
	Layanan Umum (layanan)						42,9	47,9	48,9	50,4	52,4	242,5	
	a. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Persuratan Dan Ketatausahaan Pimpinan sesuai SOP (%)	100	100	100	100	100							
	b. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Dalam Pengelolaan Rumah Tangga Kantor Pusat KKP dan Ketatausahaan Biro sesuai SOP (%)	86	87	88	89	90							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	d. Persentase Pencapaian Standar Pemenuhan Dukungan Layanan Pengadaan sesuai SOP (%)	65	67	70	72	75						
	Layanan Perkantoran (layanan)						190,1	196,8	201,1	205,5	210,4	1.003,9
	Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Layanan Perkantoran Lingkup Sekretariat Jenderal (Bulan)	12	12	12	12	12						
	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri						40,3	42,3	45,3	48,3	51,3	227,5
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi Tanggung Jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	3,55	3,60	3,65	3,70	3,75						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	72	73	74	75	76							
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi (Layanan)						14,3	14,8	15,8	16,8	17,8	79,5	
	Rasio Jumlah Pemberitaan yang Negatif Dibanding Total Pemberitaan tentang KKP (%)	< 15	< 14	< 13	< 12	< 11							
	Layanan Protokoler (Layanan)						18,5	19,0	20,0	21,0	22,0	100,5	
	Terselenggaranya Pelayanan kepada Pimpinan (Layanan)	1	1	1	1	1							
	Layanan Kerja Sama Internasional (Layanan)						7,5	8,5	9,5	10,5	11,5	47,5	
	a. Persentase Dokumen Kerja Sama Internasional yang Diterima/Ditindaklanjuti Dalam Kerangka Kerja Sama (%)	90	90	90	90	90							
	b. Kerja Sama Selatan- Selatan dan Tringular Bidang Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	2	2	2	2	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	8,3	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP							54,0	56,0	59,0	62,0	65,0	296,0
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
	a. Komponen Nilai Reformasi Birokrasi KKP yang menjadi Tanggung Jawab Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Nilai)	4,44	4,50	4,56	4,63	4,69						
	b. Nilai Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP (Nilai)	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2						
	c. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Indeks)	72	73	74	75	76						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)						54,0	56,0	59,0	62,0	65,0	296,0
	a. Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat I						5,2	6,1	7,2	8,2	9,3	
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat Efektivitas Pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I (Nilai)	26	27	28	29	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Lingkup Mitra Inspektorat I (Level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (Nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat I (Unit Kerja)	6	7	8	9	10						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	I (Per Tahun) (Rekomendasi)											
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							6,5	7,2	8,2	9,2	10,2	41,3
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup mitra Inspektorat II											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat II						6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	42,0
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Mitra Inspektorat II (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat II (%)											
	c. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat II (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat II (Nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Lingkup Mitra Inspektorat II (Level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II (Nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat II (Unit Kerja)	12	14	16	18	20						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat II (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Lingkup Mitra Inspektorat II (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (Per Tahun) (Rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat II (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						6,8	7,6	8,6	9,6	10,6	43,2
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup mitra Inspektorat III											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat III						6,8	7,8	8,8	9,8	10,8	44,0
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	d. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat III (Nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Lingkup Mitra Inspektorat III (Level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat III (Nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat III (Unit Kerja)	15	17	19	21	23						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat III (%)											
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Lingkup Mitra Inspektorat III (%)	60	65	70	75	80						
	l. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat III (Per Tahun) (Rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat III (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat III (%)	100	100	100	100	100						
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan						5,8	6,7	7,7	8,7	9,8	38,7

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup mitra Inspektorat IV											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat IV						5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	39,0
	a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	b. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	d. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	72,50	75	77,50	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	e. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat IV (Nilai)	26	27	28	29	30						
	f. Level Maturitas Implementasi SPI Lingkup Mitra Inspektorat IV (Level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	g. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (Nilai)	A (81)	A (82)	A (83)	A (84)	A (85)						
	h. Jumlah Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Lingkup Mitra Inspektorat IV (kumulatif) (Unit Kerja)	9	11	13	15	17						
	i. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	j. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85	86	87	88	89						
	k. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ditindaklanjuti Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)											
	1. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Per Tahun) (Rekomendasi)	4	4	4	4	4						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100						
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan							5,8	6,7	7,7	8,7	9,7	38,6
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup mitra Inspektorat V											
	Pengawasan intern pada mitra Inspektorat V dan pengawasan dengan tujuan tertentu lingkup KKP						5,8	6,8	7,8	8,8	9,8	39,0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Tingkat Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat V (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	b. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat V	70	72,50	75	77,50	80						
	c. Indeks Persepsi Anti Korupsi KKP (Indeks)	-	3,1	3,2	3,3	3,4						
	d. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat V (Nilai)	26	27	28	29	30						
	e. Level Maturitas Implementasi SPI Lingkup Mitra Inspektorat V	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	f. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat V (Nilai)	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	g. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Lingkup Mitra Inspektorat V (%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	h. Persentase Jumlah Rekomendasi Pengawasan Tujuan Tertentu yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja KKP (%)	60	65	70	75	80						
	i. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100						
	j. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat V (Per Tahun) (Rekomendasi)	2	2	2	2	2						
	k. Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT (%)	80	80	80	80	80						
	l. Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan Lingkup Mitra Inspektorat V (%)	85	86	87	88	89						
	m. Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja Lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	n. Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat V (%)	100	100	100	100	100						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan							55,2	57,3	59,4	61,8	64,3	298,0
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal											
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I						55,2	56,5	58,7	61,1	63,8	295,3
	a. Nilai Pengungkit Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal (Nilai)	26	27	28	29	30						
	b. Level Maturitas SPIP Itjen (Level)	3 (3,4)	3 (3,5)	3 (3,6)	3 (3,7)	3 (3,8)						
	c. Nilai PM SAKIP Itjen (Nilai)	A (87)	A (87,25)	A (87,50)	A (87,75)	A (88)						
	d. Level kapabilitas Itjen (IACM) (Level)	3	3	3	3	4						
	e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perbaikan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)											
	f. Indeks Persepsi Pegawai KKP Terhadap Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal (Indeks)	4	4,05	4,10	4,15	4,20						
	g. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (Indeks)	72	73	74	75	76						
	h. Persentase Pegawai Itjen yang Memenuhi Standar (%)	70	72	74	76	78						
	i. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Sekretariat Inspektorat Jenderal dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	j. Nilai IKPA Sekretariat Inspektorat Jenderal (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Sekretariat	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Inspektorat Jenderal (Nilai)											
	l. Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Inspektorat Jenderal (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	m. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Itjen (%)	70	72,50	75	77,50	80						
	n. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Inspektorat Jenderal (%)	82	84	86	88	90						
	o. Persentase Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen (%)	82	84	86	88	90						
	p. Persentase Publikasi Informasi dan Kinerja Pengawasan Intern KKP Secara Aktual (%)	80	82	84	86	88						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)											
	Persentase Pemenuhan Fasilitas Perkantoran Sesuai	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kebutuhan Tahunan Itjen (%)												
	Layanan Perkantoran (Layanan)												
	a. Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Itjen (%)	100	100	100	100	100							
	b. Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai Itjen secara tepat waktu (%)	100	100	100	100	100							
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap							406,4	430,7	455,2	479,8	498,3	2.270,4	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I												
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	30	31	32	33	34							
	b. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	72	73	74	75	76							
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Unit Kerja)	8	9	10	11	12							
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Tangkap Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (%)											
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	85	85,15	85,25	85,5	85,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Tangkap (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Setditjen Perikanan Tangkap yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setditjen Perikanan Tangkap (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Nilai IKPA Lingkup Setditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Lingkup Setditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							-				-
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (Bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budi Daya						336,5	350,6	397,8	445,9	499,4	2.030,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Unit Kerja)	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen Perikanan Budi Daya Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setditjen PB (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya(Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya (Bulan)												
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						247,2	286,6	303,4	317,5	324,8	1.479,4	
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I												
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34							
	b. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PSDKP (Indeks)	72	73	74	75	76							
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Unit Kerja)	4	5	6	7	8							
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PSDKP Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PSDKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan (Bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan						127,6	140,3	190,1	209,0	213,5	880,4
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Setditjen PDSPKP (Indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit Kerja Yang Berpredikat Menuju	2	3	3	4	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Wilayah Bebas Dari Korupsi (Unit Kerja)											
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PDSPKP Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PDSPKP (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	84	84,15	84,25	84,5	84,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PDSPKP (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja Setditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setditjen PDSPKP (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	j. Nilai IKPA Lingkup Setditjen PDSPKP (Nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Lingkup Setditjen PDSPKP (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	Persentase Pemenuhan Layanan Internal/ <i>Overhead</i> Lingkup Sekretariat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran											
	Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Bulan)	12	12	12	12	12						
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut						169,7	193,9	214,6	235,0	256,0	1.069,2
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Nilai)	30	31	32	33	34						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Indeks Profesionalitas ASN Setditjen PRL (Indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Unit Kerja)	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Ditjen PRL Dibandingkan Realisasi Anggaran Ditjen PRL (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP Ditjen PRL (Nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75						
	f. Level Maturitas SPIP Ditjen PRL (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja Setditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase Rekomendasi yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Setditjen PRL(%)	60	65	70	75	80						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Nilai PMPRB Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BKIPM (Indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit Kerja)	6	7	8	9	10						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) BKIPM Dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						
	e. Nilai PM SAKIP BKIPM (Nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BKIPM (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase Unit Kerja Sekretariat BKIPM yang Menerapkan Sistem	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan Lingkup BKIPM (bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah pemenuhan layanan perkantoran Lingkup Sekretariat BKIPM-(Bulan)	12	12	12	12	12						
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan							930,1	985,9	1.079,3	1.178,8	1.273,5	5.447,6
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I											
	a. Nilai PMPRB BRSDMKP (Nilai)	30	31	32	33	34						
	b. Indeks profesionalitas ASN Sekretariat BRSDMKP (Indeks)	72	73	74	75	76						
	c. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit Kerja)	9	10	11	12	13						
	d. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keuangan (LK) BRSDMKP Dibandingkan Realisasi Anggaran BRSDMKP (%)											
	e. Nilai PM SAKIP BRSDMKP (Nilai)	86	86,15	86,25	86,5	86,75						
	f. Level Maturitas SPIP BRSDMKP (Level)	3	3	3	3	3						
	g. Persentase unit kerja Sekretariat BRSDMKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						
	h. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat BRSDM (%)	60	65	70	75	80						
	i. Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1	1	1	1	1						
	j. Nilai IKPA Lingkup Sekretariat BRSDMKP (nilai)	88	89	89	90	90						
	k. Nilai NKA Lingkup Sekretariat BRSDMKP (Nilai)	85	86	87	88	89						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Dukungan Manajemen Satker											
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal											
	a. Tersedianya prasarana dan sarana Sekretariat BRSDMKP (Layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Tersedianya Prasarana dan Sarana Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran											
	a. Jumlah Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lingkup Sekretariat BRSDMKP (Bulan)	12	12	12	12	12						
	b. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Sekretariat BRSDMKP (Bulan)	12	12	12	12	12						
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kelautan dan Perikanan							21,6	22,8	23,9	25,0	26,7	120,0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang Membentuk <i>Start Up</i> (Usaha Rintisan) (Orang)	193	205	215	225	255						
	Kelompok Kelautan dan Perikanan Mandiri yang Dibentuk											
	a. Kelompok Kelautan Dan Perikanan yang Dibentuk (Kelompok)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	b. Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya (Kelompok)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat											
	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek KP (Paket)	6	6	6	6	6						
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkatkan											
	Persentase Peningkatan PNBK SDMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							179,4	213,5	226,6	249,2	268,2	1.136,9
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih						52,0	54,5	57,5	60,5	64,8	
	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Dilatih (Orang)	25.200	26.000	27.000	28.000	30.000						
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi						2,1	3,1	4,1	5,1	6,0	
	Jumlah SDM Kelautan dan Perikanan yang Memiliki Sertifikat Kompetensi (Orang)	3.500	5.250	6.500	8.500	10.000						
	Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan						90,5	109,4	112,1	114,5	117,1	
	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Disuluh (Orang)	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000						
	Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						28,5	38,8	43,7	58,4	68,1	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Satuan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar (Unit)	7	7	7	7	10						
	Percontohan Penyuluhan Kelautan Dan Perikanan Yang Diterapkan						2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	
	Jumlah Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan (Unit)	34	34	40	45	50						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan						3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	
	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)	1	1	1	1	1						
	Pendidikan Kelautan dan Perikanan						578,1	645,6	691,4	725,0	761,8	3.401,9
	Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten						166,8	210,9	243,1	260,0	275,0	
	Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	8.239	9.173	10.633	12.286	13.115						
	Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan						3,9	5,0	7,5	8,0	10,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pengabdian Pendidikan Tinggi KP (Paket)	17	17	17	17	17						
	Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan						118,2	136,6	142,7	153,8	160,0	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendidikan KP (Unit)	21	22	22	22	22						
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan						4,0	4,9	5,9	6,9	8,0	
	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan (Layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Dukungan Manajemen Satker						13,3	14,3	15,4	16,5	17,3	
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	1	1	1						
	Layanan Perkantoran						271,9	273,9	276,8	279,8	291,5	
	a. Jumlah Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1						
	b. Gaji dan Tunjangan (Bulan)	12	12	12	12	12						
	c. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (Bulan)	12	12	12	12	12						
Program Kualitas Lingkungan Hidup							132,9	180,7	203,1	226,9	244,6	988,1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perikanan (SKPT) Meningkat											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							88,4	113,7	131,1	144,7	157,1	634,9
	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil (Nasional dan Daerah) yang Ditetapkan						3,9	6,0	8,0	10,0	12,0	
	Luasan Kawasan Konservasi baru (Juta Ha)	700.0 00	800.00 0	900.00 0	900.00 0	900.000						
	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, Dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional						42,7	55,0	65,0	70,0	75,0	
	Kawasan Konservasi yang Operasional (Kumulatif) (Juta Ha)	10.00 0.000	14.500 .000	17.500 .000	19.000 .000	20.000.0 00						
	Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan						13,6	25,0	30,0	35,0	40,0	
	Luas Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan Secara	10.00 0.000	14.500 .000	17.500 .000	19.000 .000	20.000.0 00						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Berkelanjutan (Kumulatif) (Juta Ha)											
	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan						8,0	5,4	5,5	5,9	6,0	
	Jumlah Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, dan/atau Dilestarikan (Jenis)	6	10	14	18	20						
	Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya Secara Berkelanjutan						8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	
	Jumlah Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan (Jenis)	5	12	16	18	20						
	Jejaring, Kemitraan/Kerja Sama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut						10,0	12,0	12,0	13,0	13,0	
	a. Konvensi dan Kerja Sama Konservasi yang Mendukung Konservasi	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keanekaragaman Hayati Laut (Kerja Sama)											
	b. Jejaring Kemitraan Konservasi yang Mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut (Kelompok)	20	5	5	5	5						
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						44,5	67,0	72,0	82,2	87,5	353,2
	Kawasan Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim						20,0	25,0	25,0	30,0	30,0	
	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Ketangguhannya Terhadap Bencana dan	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Dampak Perubahan Iklim (Kawasan)												
	Kawasan Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi						17,4	35,0	40,0	45,0	50,0		
	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi (Lokasi)	16 (200 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)	16 (400 ha mangrove)							
	Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direstorasi Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran						7,1	7,0	7,0	7,2	7,5		
	Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	8	6	6	5	5							
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						2.034,7	2.810,5	3.327,7	3.599,7	3.955,5	15.728,0	
	Kesejahteraan Nelayan Meningkat												-
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks)	102	103	105	106	107							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp Juta/Orang/Bulan)	3,95	4,23	4,55	4,91	5,36							-
	Kesejahteraan Pembudi daya Ikan meningkat												
	Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi) (Indeks)	101	102	103	104	105							
	Rata-rata Pendapatan Pembudi Daya (Rp Juta/Orang/Bulan)	3,45	3,50	3,55	3,65	3,70							
	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat												
	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	102,75	103,00	103,25	103,50	103,75							
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP Meningkat												
	Tingkat Partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	85	86	87	88	89							
	Ekonomi Sektor kelautan dan Perikanan Meningkat												
	a. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp.Triliun)	5,21	5,49	5,79	6,10	6,43							
	b. Persentase Peningkatan PNBPN dari Sektor KP (%)	5	7,5	10	12,5	15							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	52	54	56	58	60						
	d. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program (Rp Triliun)	3	3,3	3,6	3,9	4,2						
	e. Persentase Pencapaian Target PNBK BLU LPMUKP (%)	95	95	96	96	97						
	f. Persentase Penyaluran Dana Bergulir BLU LPMUKP (%)	95	96	97	98	100						
	g. Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor dan Domestik Tidak Berasal dari <i>Destructive Fishing</i> (Lokasi)	5	5	5	5	5						
	h. Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antararea Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi Dan Dibatasi (%)	90	90	90	90	90						
	i. Jumlah Jasa Kelautan yang Dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Lokasi Kawasan Laut dan Wilayah Pesisir yang Memiliki Rencana Zonasi yang Akan Ditetapkan Menjadi Peraturan Perundang-Undangan (Kawasan)	14	24	26	26	12 (102 Kumulati f)						
	Kepatuhan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>) Kelautan dan Perikanan Meningkat											
	Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%)	94	95	96	97	98						
	Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkat											
	Produksi Perikanan Tangkap (Juta Ton)	8,02	8,42	8,88	9,43	10,10						-
	Produktivitas Perikanan Budi Daya Meningkat											
	a. Produksi Perikanan Budi Daya (Ikan) (Juta Ton)	7,45	7,92	8,69	9,48	10,32						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	b. Produksi Perikanan Budi Daya (Rumput Laut) (Juta Ton)	10,99	11,55	11,8	12,1	12,3						
	c. Produksi Ikan Hias (Miliar Ekor)	1,87	1,98	2,1	2,2	2,3						
	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat											
	Produksi Garam (Juta Ton)	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4						
	Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari Dan BMKT											
	Kawasan Wisata Bahari Dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	12	14	16	18	20						
	Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan	5	12	18	24	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Persentase Cakupan WPP NRI yang Dipantau Dari Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> (%)	54,18	60	65	70	75						
	b. Indeks Kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (Indeks)	86,72	88	89	90	91						
	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas											
	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan (%)	93	93	93	93	93						
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan							60,0	87,0	121,4	130,1	147,3	545,8
	Kapal perikanan yang memenuhi standar kelaikan						3,5	4,5	4,6	4,8	5,1	-
	Jumlah Kapal Perikanan yang Memenuhi Standar Laik Laut, Laik Tangkap, dan Laik Simpan (Unit)	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800						
	Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi						3,5	4,5	4,7	4,9	5,2	
	Jumlah Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi Berdasarkan Keahlian dan	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keterampilan (Kumulatif) (Orang)											
	Rekomendasi Teknis, Rancangan Teknis Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi, dan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan						5,5	7,0	7,2	7,7	8,0	
	Jumlah Rekomendasi Teknis, Rancangan Teknis Standar Nasional Indonesia, Sertifikasi, dan Kerja sama Pemanfaatan Teknologi Penangkapan Ikan (Dokumen) (Kumulatif)	16	23	30	37	44						
	Kapal Perikanan yang Terdaftar						3,0	4,0	4,2	5,2	5,6	
	Jumlah Kapal Perikanan yang Terdaftar Sebagai Kapal Perikanan (Kumulatif) (Unit)	11.500	12.250	13.200	14.350	15.700						
	Kapal Perikanan Bantuan yang Terbangun						15,8	25,5	43,6	45,5	53,0	
	Jumlah Kapal Perikanan Bantuan yang Terbangun (Unit)	30	50	70	90	110						
	Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu						3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penangkapan Ikan yang Terkelola Sesuai Rancangan Teknis dan Memenuhi Standar											
	Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terkelola Sesuai Rancangan Teknis dan Memenuhi Standar (Unit)	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000						
	Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan yang Terbangun						13,0	21,5	35,5	37,5	43,0	
	Jumlah Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Bantuan yang Terbangun (Unit)	500	750	1.000	1.250	1.500						
	Kapal Perikanan yang Dihitung Produktivitasnya						0,5	1,0	1,2	1,5	2,0	
	Jumlah Kapal Perikanan yang Dihitung Produktivitasnya (Unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600						
	Permesinan Kapal Perikanan yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan						2,5	3,0	3,1	3,7	4,2	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pemantauan dan Standarisasi Permesinan Kapal yang Memenuhi Aspek Operasional Penangkapan Ikan (Kumulatif) (Provinsi)	14	19	24	29	34						
	Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang Diterapkan						2,5	3,5	3,7	4,0	4,3	-
	Jumlah PKL yang Diterapkan (Orang)	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat Kemandirian SKPT Saumlaki (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang Memenuhi Ketentuan						1,0	1,5	1,7	2,2	2,5	
	Jumlah Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang Diterbitkan (Unit)	100	150	200	250	300						
	Kapal Perikanan Bantuan yang Dipantau Operasionalnya						4,0	5,0	5,2	5,7	6,2	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Jumlah Kapal Perikanan Bantuan yang Dipantau Operasionalnya (Unit)	2.219	2.543	2.593	2.663	2.753							
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan							141,5	416,0	568,2	650,4	732,7	2.508,8	
	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang ditingkatkan fasilitasnya						19,7	30,0	40,0	50,0	60,0	-	
	Jumlah Pengembangan PPS (Lokasi)	7	7	7	7	7							
	Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang Meningkat Operasionalnya						17,9	20,0	25,0	30,0	35,0	-	
	Tingkat Operasional PPS (%)	80	81	82	83	84							
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang Ditingkatkan Fasilitasnya						66,3	50,0	60,0	70,0	80,0	-	
	Jumlah Pengembangan PPN (Lokasi)	17	18	19	20	21							
	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang Meningkat Operasionalnya						12,9	22,5	27,5	32,5	37,5	-	
	Tingkat Operasional PPN (%)	80	81	82	83	84							
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang Ditingkatkan Fasilitasnya						3,7	75,0	95,0	115,0	135,0	-	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pengembangan PPP (Lokasi)	12	3	4	5	6						
	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang Meningkat Operasionalnya						4,8	5,0	5,5	6,0	6,5	-
	Tingkat Operasional PPP (%)	75	76	77	78	79						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang Ditingkatkan Fasilitasnya						4,5	80,0	100,0	120,0	140,0	
	Jumlah Pengembangan PPI (Lokasi)	1	2	3	4	5						
	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang Meningkatkan Operasionalnya						9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	
	Tingkat Operasional PPI (%)	67	68	69	70	71						
	Pelabuhan Perikanan yang diusulkan penetapan kelasnya						1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Diusulkan Penetapan Kelasnya (Lokasi)	20	25	30	35	40						
	Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi Dan Bertaraf Internasional						-	120,0	200,0	210,0	220,0	
	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi	0	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dan Bertaraf Internasional (Lokasi)												
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Merauke yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7		
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Merauke (Skala 1-5)	4	4	4	4	5							
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan							66,3	80,4	89,3	100,9	113,0	450,0	
	Alokasi izin yang diterbitkan						2,2	2,7	3,2	3,7	4,2		-
	Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan (Unit)	10.500	10.600	10.650	10.700	10.750							
	Realisasi Kapal Terhadap Alokasi Perizinan sesuai SIUP (SIPI/SIKPI)						2,7	3,2	3,7	4,2	4,7		
	Jumlah Realisasi Kapal Terhadap Alokasi Perizinan Sesuai SIUP (SIPI/SKPI) (Unit)	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600							
	Sistem Perizinan Pusat- Daerah yang Terintegrasi						9,1	15,0	18,0	20,0	22,0		
	Jumlah Provinsi yang Mengintegrasikan Sistem	34	34	34	34	34							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Perizinan Pusat-Daerah (Provinsi)												
	Fasilitasi Nelayan yang Terlindungi						2,9	3,5	4,0	4,5	5,0		-
	Jumlah Fasilitasi Nelayan yang Terlindungi (Orang)	20.00 0	25.000	30.000	35.000	40.000							
	Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang Tersalurkan						27,7	20,0	20,0	20,0	20,0		
	Jumlah Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang Tersalurkan (Orang)	150.0 00	120.00 0	120.00 0	120.00 0	120.000							
	Nelayan Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang Diidentifikasi						2,5	3,1	3,6	4,1	4,6		
	Jumlah Nelayan yang Diidentifikasi Sebagai Penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Orang)	150.0 00	120.00 0	120.00 0	120.00 0	120.000							
	Nelayan yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap						3,3	5,0	7,5	8,5	10,0		
	Jumlah Nelayan yang Terfasilitasi Kredit Perikanan Tangkap (Nelayan)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000							
	Keluarga Nelayan yang Difasilitasi Diversifikasi Usahanya						4,8	5,0	5,3	5,5	5,8		

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Diversifikasi Usaha Keluarga Nelayan (Kumulatif) (RTP)	2.900	4.000	5.000	6.000	7.000						
	Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan yang Difasilitasi Sertifikasinya						4,0	5,0	5,5	6,3	7,0	
	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat) (Bidang Tanah)	15.00 0	15.000	15.000	15.000	15.000						
	Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya						3,0	3,2	3,3	3,5	3,6	
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (Kumulatif) (Kelompok)	2.250	2.400	2.550	2.750	3.000						
	Kawasan Sentra/Kampung Nelayan yang Difasilitasi Penataannya						2,5	2,8	3,0	3,3	3,5	
	Jumlah Kawasan Sentra/Kampung Nelayan yang Difasilitasi Penataannya (Lokasi)	40	40	40	40	40						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna yang Mandiri						1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tingkat Kemandirian SKPT Natuna (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Kampung Nelayan Maju						-	10,0	10,0	15,0	20,0	
	Jumlah Kampung Nelayan Maju (Kelompok Masyarakat)	0	10	10	15	20						
Pengelolaan Sumber Daya Ikan							28,4	42,5	54,9	59,4	64,7	249,9
	WPPNRI yang Dievaluasi Dan Dihitung Alokasi Sumber Daya Ikannya (WPPNRI)						1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	-
	Jumlah WPPNRI yang Dievaluasi dan Dihitung Alokasi Sumber Daya Ikannya (WPPNRI)	11	11	11	11	11						
	Laut Pedalaman, Teritorial, dan Perairan Kepulauan yang Terkelola Sumber Daya Ikannya						1,7	2,0	2,5	3,0	3,5	
	Tingkat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Laut Pedalaman, Territorial, dan Perairan Kepulauan (%)	60	70	80	90	100						
	ZEEI Dan Laut Lepas yang Terkelola Sumber Daya Ikannya (WPPNRI)						6,8	7,0	7,2	7,4	7,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah ZEEI Dan Laut Lepas yang Terkelola Sumber Daya Ikannya (WPPNRI)	7	8	8	8	8						
	Kapal Perikanan yang Menerapkan Log Book Penangkapan Ikan						3,6	4,2	4,4	4,6	4,9	
	Jumlah Kapal Perikanan yang Menerapkan Log Book Penangkapan Ikan (Unit)	12.00 0	15.000	16.000	18.000	20.000						
	Kapal Perikanan yang Dipantau oleh Observer						7,7	8,0	8,2	8,5	8,9	
	Jumlah Hari Layar Pemantauan oleh Observer Diatas Kapal Perikanan (Hari Layar)	20.00 0	20.500	21.000	21.500	22.000						
	Perairan Darat yang Terkelola Sumber Daya Ikannya						2,4	2,8	3,4	3,9	4,3	
	Jumlah Perairan Darat yang Terkelola Sumber Daya Ikannya (Kumulatif) (Lokasi)	25	29	33	37	41						
	Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang Operasional						4,1	15,0	25,0	27,0	30,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan (WPPNRI) yang Operasional Paket)	11	11	11	11	11						
	b. Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang Menjadi Model Percontohan (WPPNRI) Paket)	3	5	7	9	11						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, Kabupaten Nunukan yang Mandiri						1,1	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat Kemandirian SKPT Nunukan (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
Pengelolaan Perbenihan Ikan							138,4	200,2	221,2	240,5	262,5	1.062,8
	Produksi induk unggul						47,1	65,0	70,0	70,0	75,0	
	Jumlah produksi induk unggul (Ekor, nonkumulatif)	1.000 .000	1.100. 000	1.200. 000	1.300. 000	1.400.00 0						
	Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Rote, Kabupaten Rote Ndao yang Mandiri						2,0	3,0	4,0	4,5	5,0	
	SKPT Kabupaten Rote Ndao yang Mandiri (Skala 1-5)	4	4	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Unit Perbenihan yang Direhabilitasi						18,0	25,0	30,0	35,0	40,0	
	Jumlah Unit Pembenihan Ikan yang Direvitalisasi (Unit)	60	70	80	90	100						
	Benih Bermutu Ikan Air Tawar yang Didistribusikan Ke Masyarakat						17,1	24,0	28,0	32,0	36,0	
	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang Didistribusikan ke Masyarakat (Ekor)	48.96 0.722	50.000 .000	51.000 .000	52.000 .000	54.000.0 00						
	Benih Bermutu Ikan Air Payau yang Didistribusikan ke Masyarakat						10,1	16,4	19,0	22,0	23,0	
	Jumlah Benih Ikan Air Payau yang Didistribusikan ke Masyarakat (Ekor)	158.5 20.00 0	159.00 0.000	160.00 0.000	161.00 0.000	162.000. 000						
	Benih Bermutu Ikan Air Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat						32,6	43,2	45,6	48,0	50,4	
	Jumlah Benih Ikan Air Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat (Ekor)	8.277 .000	9.000. 000	9.500. 000	10.000 .000	10.500.0 00						
	Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat						7,0	13,6	15,2	17,8	20,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Bantuan Bibit Rumput Laut yang Didistribusikan ke Masyarakat (Kg)	200.000	350.000	400.000	450.000	500.000						
	Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Benih Ikan (Kebun Bibit Kultur Jaringan)						4,0	8,0	8,4	10,2	12,0	
	Jumlah Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budi Daya dan Percontohan Perbenihan Ikan (Paket)	80	110	120	140	150						
	Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Perbenihan (Sertifikat CPIB)						0,5	2,0	1,0	1,0	1,1	
	Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Perbenihan (Paket)	500	500	500	500	500						
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan							156,5	302,8	347,1	374,9	390,7	1.572,0
	Sampel yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan						16,8	16,7	16,7	16,7	16,2	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Sampel)	50.00 0	57.000	64.000	70.000	78.000						
	Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Monitoring Residu)						32,4	42,0	52,0	62,0	67,6	
	a. Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Sampel)	10.00 0	14.000	18.000	22.000	26.000						
	b. Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Paket)	200	225	250	275	300						
	c. Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan (Paket)	5	5	7	9	11						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Kawasan dan Kesehatan Ikan						43,3	112,0	123,2	134,4	140,0	
	Jumlah Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budi Daya dan Percontohan Kawasan dan Kesehatan Ikan (Paket)	38	100	110	120	125						
	Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT						39,1	75,0	85,0	85,0	85,0	
	Jumlah Rehabilitasi Sarana Prasarana UPT (Unit)	15	15	15	15	15						
	RSNI 3 Perikanan Budi Daya						1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	
	Jumlah RSNI 3 Perikanan Budi Daya (Dokumen)	10	12	14	16	18						
	Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan						23,5	55,5	68,5	75,0	80,0	
	a. Jumlah Percontohan Pengelolaan Kluster Kawasan Budi Daya Berkelanjutan (Lokasi)	10	20	30	40	50						
	b. Sarana Budi Daya untuk Mendukung Revitalisasi Tambak (Paket)	282	250	250	250	250						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan							74,1	105,4	123,0	140,5	153,0	596,0
	Bidang Lahan Budi Daya yang Disiapkan Sertifikasinya						1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	
	Jumlah Bidang Lahan Budi Daya yang Disiapkan Sertifikasinya (Bidang)	13.00 0	13.000	13.000	13.000	13.000						
	Perizinan Usaha dan Rekomendasi Teknis						1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	
	Jumlah Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang Diterbitkan Layanan Perizinannya (Unit)	50	50	70	75	80						
	Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Sumba Timur yang Mandiri						1,9	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat Kemandirian SKPT Di Bawah Tanggung Jawab Direktorat Produksi dan Usaha (Skala 1-5)	4	4	4	4	5						
	Luasan Usaha Budi Daya yang Dilindungi Asuransi						3,5	6,0	8,0	9,9	11,7	
	Jumlah Luasan Usaha Budi Daya yang Dilindungi Asuransi untuk	5.000	6.000	7.500	9.000	10.000						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelangsungan Usahanya (Ha)											
	Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Produksi dan Usaha Perikanan Budi Daya						61,7	90,0	105,0	120,0	130,0	
	Jumlah Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budi Daya dan Percontohan Perikanan Budi Daya Bidang Produksi dan Usaha (Paket)	551	800	900	1000	1100						
	Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi untuk Ekspor Bidang Produksi dan Usaha						4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	
	Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Produksi dan Usaha (Paket)	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000						
	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan						34,1	72,1	73,2	74,4	76,1	329,9
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kota Sabang yang Mandiri						2,0	2,0	2,2	2,4	2,7	
	Tingkat Kemandirian SKPT Sabang (Skala 1-5)	4	4	4	4	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budi Daya Di UPT						14,0	14,0	39,7	35,6	31,9	
	Jumlah Produksi Operasional Pabrik Pakan Mandiri Skala Medium untuk Bantuan Kepada Masyarakat (Kg)	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000						
	Bantuan Sarana Prasarana dan Percontohan Pakan Ikan Mandiri						17,0	55,0	30,0	35,0	40,0	
	Jumlah Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Budi Daya dan Percontohan Pakan Mandiri (Paket)	91	101	110	120	130						
	Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Pakan dan Obat Ikan						1,1	1,1	1,3	1,4	1,5	
	Jumlah Pengujian Residu Produk Perikanan Budi Daya dan Sertifikasi Untuk Ekspor Bidang Pakan dan Obat Ikan (Paket)	130	155	180	205	230						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							134,3	150,3	157,6	162,9	169,2	774,3
	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT						9,2	15,0	18,0	20,0	22,0	
	a. Jumlah Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah Kawasan BMKT yang Teridentifikasi Dan Terkelola (Kawasan)	2	2	2	2	2						
	Lahan Garam yang Difasilitasi						73,4	75,0	76,0	77,0	78,0	
	Jumlah Lahan Garam yang Difasilitasi (Ha)	600	750	750	750	750						
	Pembangunan Sarana Niaga Garam Rakyat						41,1	50,0	51,5	53,1	55,0	
	a. Jumlah Sarana Niaga Garam Rakyat yang Direvitalisasi (Unit)	70	100	100	100	100						
	b. Jumlah Sarana dan/atau Di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (Unit)	4	2	2	2	2						
	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten						1,7	2,0	2,2	2,4	2,7	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kepulauan Talaud yang Mandiri											
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi						1,9	3,0	4,0	4,0	5,0	
	Jumlah Kawasan yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut						1,6	1,2	1,3	1,4	1,0	
	Jumlah Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola Untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	5	5	5	5	5						
	Pengelolaan Biofarmakologi						3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	
	Jumlah Unit Bisnis Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2	2	2	2	2						
	Fasilitasi Perizinan Perairan						2,5	0,6	0,6	0,5	0,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kawasan yang Terfasilitasi Perizinan Pengelolaan Perairan (Lokasi)	5	5	5	5	5						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							44,8	48,6	50,6	51,6	52,7	248,3
	Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ Terluar yang Tersedia Infrastruktur Kelautan Dan Perikanan						35,6	36,0	37,5	38,0	39,0	
	Jumlah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/ Terluar yang Dibangun Sarana Prasarannya (Kawasan)	7	7	7	7	7						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai yang Mandiri						2,1	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						
	Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya						3,5	6,0	6,5	7,0	7,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Tradisional, dan Masyarakat Lokal Di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Terfasilitasi Dalam Rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	5	12	18	24	30						
	Pulau-Pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar yang Difasilitasi Pemanfaatannya						3,6	3,6	3,6	3,6	3,7	
	Jumlah Pulau-pulau Kecil/Terluar yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (Pulau)	10	12	10	10	8						
Perencanaan Ruang Laut							26,2	32,9	28,1	29,1	26,1	142,4
	Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang-undangan						5,9	6,9	6,9	0	0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang-undangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut (Perairan Laut)	6	6	4	0	0						
	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu Yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang-undangan						9,3	12	6	11,2	3,4	
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang Ditetapkan Melalui Peraturan Perundang-undangan (Kawasan)	25	28	19	9	5						
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut						6	7	8	9,5	11	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah Perizinan Lokasi Di Wilayah Perairan Pesisir dan Laut (Lokasi)	10	12	14	16	18						
	b. Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut Di Pusat Dan Daerah (Lokasi)	12	27	26	40	46						
	Provinsi yang Memiliki Dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi						3	5	5	6	9	
	Jumlah Provinsi yang Memiliki Dokumen Monitoring Evaluasi/Kajian Peninjauan Kembali/Peraturan Turunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Provinsi)	13	24	29	24	31						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang Mandiri						2	2	2,2	2,42	2,66	
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)	4	4	4	4	4						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pemantauan, Operasi Armada, dan Infrastruktur	Operasi Armada, dan Pengawasan						723,9	844,5	1.036,3	1.104,1	1.253,2	4.962,1
	Operasional Kapal Pengawas						355	435	510	560	610	
	Jumlah Hari Operasional Kapal Pengawas Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan Merusak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Di WPPNRI (Hari Operasi)	150	180	180	180	180						
	Operasional Pesawat Patroli						31,5	35,8	36,8	37,8	38,8	
	Jumlah Hari Operasi Pesawat Patroli (Hari Operasi)	150	180	180	180	180						
	Awak Kapal Pengawas yang Kompeten						10,17	10,2	10,3	10,3	10,4	
	Jumlah Awak Kapal Pengawas yang Kompeten (Orang)	285	325	375	400	415						
	Armada Pengawasan yang Siap Operasi						95	105	115	125	135	
	Jumlah Armada Pengawasan yang Siap Operasi (Unit)	103	116	129	142	155						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang Operasional dan Terintegrasi						12	12	14	15	16	
	Jumlah Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi (Sistem)	1	2	2	1	1						
	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat						41,5	47,73	54,88	63,12	72,58	
	Jumlah Hari Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Hari Operasi)	50	50	50	50	50						
	Kapal Pengawas yang Dibangun						86,7	104	200	192	264	
	Jumlah Kapal Pengawas yang Dibangun (Unit)	2	3	3	3	3						
	Speed Boat Pengawas yang Dibangun						35,4	35	35	35	35	
	Jumlah Speed Boat Pengawas yang Dibangun (Unit)	11	10	10	10	10						
	Kelompok Masyarakat Pengawas Pengawas (POKMASWAS) yang Dibina						3,8	6,5	7	7,5	8	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Dalam Membantu Pengawasan SDKP											
	Jumlah POKMASWAS yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP (Kelompok)	1010	1050	1100	1150	1200						
	Bangunan/Pos Pengawasan yang Dibangun						44	50	50	55	60	
	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang Dibangun (Unit)	18	15	15	15	15						
	Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Disupervisi Pembangunannya						6	2	2	2	2	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Disupervisi Pembangunannya (Unit)	31	31	32	32	33						
	Awak Kapal Pengawas yang Memenuhi Kualifikasi Kesehatan						1	1	1	1	1	
	Jumlah Awak Kapal Pengawas yang Memenuhi Kualifikasi Kesehatan (Orang)	502	532	547	601	626						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kelompok POKMASWAS yang Dievaluasi Keaktifannya						2,18	1	1	1	1	
	Jumlah POKMASWAS yang Dievaluasi Keaktifannya (Kelompok)	34	34	34	34	34						
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan							63,3	50,8	53,5	52,5	55,1	275,3
	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Korporasi/Pemilik yang Disidik Secara Akuntabel						0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Korporasi/ Pemilik yang Disidik Secara Akuntabel (Kasus)	1	1	1	1	1						
	Perkara Tindak Pidana Kelautan Dan Perikanan yang Disidik Secara Akuntabel						6,2	8,3	8,5	8,7	8,9	
	Jumlah Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Disidik Secara Akuntabel (Kasus)	150	200	200	200	200						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Ditangani Secara Akuntabel						5,4	7,2	7,4	7,6	7,8	
	Jumlah Barang Bukti dan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Ditangani Secara Akuntabel (Kasus)	150	200	200	200	200						
	Nelayan yang Difasilitasi Pemulangannya dan Pemberian Pemahaman untuk Tidak Melintas Batas Ke Perairan Negara Lain						0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	
	Jumlah Nelayan yang Difasilitasi Pemulangannya dan Pemberian Pemahaman untuk Tidak Melintas Batas Ke Perairan Negara Lain (Orang)	400	400	400	400	400						
	Forum Kerja Sama Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan						1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Terselenggara (Forum)	2	2	2	2	2						
	PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum Di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Kompeten						3,7	1,9	3,7	1,9	3,7	
	Jumlah PPNS Perikanan/Aparat Penegak Hukum Di Bidang Kelautan dan Perikanan yang Kompeten (Orang)	60	30	60	30	60						
	Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal						45,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	Jumlah Layanan Operasional Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Layanan)	4	4	4	4	4						
	Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) Nasional yang						0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Terpantau dan Dianalisis Proses Hukumnya											
	Jumlah Kasus TPKP Nasional yang Terpantau dan Dianalisis Proses Hukumnya (Kasus)	200	250	250	250	250						
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan							15,1	16,9	18,9	20,8	22,7	94,3
	Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang Diperiksa Kepatuhan						0,8	3,0	4,0	5,0	6,0	
	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang Diperiksa Kepatuhan (Pelaku Usaha)	35	40	45	50	55						
	Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau <i>Appendiks Cites</i> yang Diperiksa kepatuannya						0,5	0,8	1,0	1,2	1,3	
	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau <i>Appendiks Cites</i> yang	30	35	40	45	50						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Diperiksa Kepatuhan (Pelaku Usaha)											
	Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa kepatuhannya						0,9	1,0	1,0	1,1	1,2	
	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhan (Pelaku Usaha)	65	75	90	105	115						
	Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau- pulau Kecil, dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan						1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhan (Pelaku Usaha)	55	80	100	130	140						
	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Kompeten						2,3	1,2	1,3	1,3	1,4	
	Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir	65	30	30	30	30						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dan Pulau-pulau Kecil yang Kompeten (Orang)												
	Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi Dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>						1,8	1,8	1,8	1,9	1,9		
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i> (Pelaku Usaha)	270	360	410	510	585							
	Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan yang Diverifikasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan						5,8	6,1	6,4	6,8	7,1		
	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Kelautan yang Diverifikasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	550	575	600	625	650							
	Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhan Dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya						0,6	0,7	0,7	0,7	0,8		
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Non- Perikanan yang Diperiksa	95	115	130	145	155							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Kepatuhanannya Dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak Pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya (Pelaku Usaha)											
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Teredukasi Kegiatan Penyadartahuan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Tertib dan Bertanggung Jawab						1,3	1,3	1,4	1,5	1,6	
	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Teredukasi Kegiatan Penyadartahuan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang Tertib dan Bertanggung Jawab	725	750	775	800	825						
	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan						13,1	18,1	20,3	22,5	24,6	98,5
	Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya						4,1	8,0	9,0	10,0	11,0	
	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Kepatuhanannya (Unit)	17.100	21.500	21.750	22.000	22.350						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya						0,8	0,8	0,9	1,0	1,1	
	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya (Unit)	432	600	655	680	705						
	Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhannya						1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	
	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Diperiksa Kepatuhannya (Unit)	432	493	513	563	613						
	Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa kepatuhannya						1,0	1,3	1,4	1,5	1,6	
	Jumlah Unit Usaha yang Melakukan Distribusi Hasil Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya (Unit)	408	377	387	412	437						
	Pelaku Usaha Sumber Daya Perikanan yang Diverifikasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhannya						4,1	4,5	5,0	5,6	6,1	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya Perikanan yang Diverifikasi Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (Pelaku Usaha)	1.873	2.297	2.330	2.365	2.410						
	Masyarakat Kelautan Dan Perikanan yang Mengikuti Penyadartahuan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Tertib dan Bertanggung Jawab						1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	
	Jumlah Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Mengikuti Penyadartahuan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan yang Tertib dan Bertanggung Jawab (Orang)	680	750	800	800	800						
	Pengawas Perikanan yang Kompeten						0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	
	Jumlah Pengawas Perikanan yang Kompeten (Orang)	230	400	400	450	500						
Karantina Ikan							78,9	95,2	104,3	109,9	117,2	505,5
	Laporan Penindakan Pelanggaran						5,4	4,7	5,0	5,4	5,8	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan											
	Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang Diselesaikan (%)	95	95	95	95	95						
	Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang dan Bersifat Invasif yang Teridentifikasi						4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	
	a. Lokasi Sebaran Jenis Ikan Dilarang dan/atau Bersifat Invasif yang Diidentifikasi (Lokasi)	94	96	98	100	102						
	b. Persentase Pencegahan Impor, Ekspor, Antararea Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Di Batasi (%)	90	90	90	90	90						
	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i>						4,1	4,2	4,3	4,7	4,8	
	Jumlah Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan <i>Biosecurity</i> (Unit)	500	430	435	440	445						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Operasional Pengawasan Ekspor, Impor, dan Domestik						20,1	26,6	28,2	29,8	31,4	
	a. Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Masuk Ke Wilayah Republik Indonesia (%)	100	100	100	100	100						
	b. Penyakit Ikan Karantina yang Dicegah Penyebarannya Antarzona (%)	100	100	100	100	100						
	c. Ekspor Ikan Dan Hasil Perikanan yang Memenuhi Standar Persyaratan Kesehatan Ikan (%)	98	98	98	98	98						
	d. Keterterimaan Ikan dan Hasil Perikanan Di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	80	125	125	125	125						
	e. Mitigasi Resiko Lalu Lintas Hasil Perikanan Ekspor, Impor dan Antararea (Parameter)	3	3	3	3	3						
	f. Sebaran Penyakit Ikan Karantina yang Teridentifikasi (Lokasi)	260	260	260	260	260						
	Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan						0,5	0,6	0,6	0,7	0,8	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Keamanan Hayati Ikan Dalam dan Luar Negeri											
	Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan (Dokumen)	6	6	6	6	6						
	Sarana dan Prasarana Pengawasan Karantina						44,8	55,0	62,0	65,0	70,0	
	Sarana dan Prasarana Pengawasan Karantina (Lokasi)	25	28	30	32	32						
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan							32,4	37,1	40,2	48,3	55,4	213,4
	Parameter Uji Laboratorium Acuan dan Laboratorium Penguji						10,7	10,7	10,8	11,8	11,8	
	a. Jumlah Parameter Uji yang Dihasilkan Oleh Laboratorium Acuan (RSNI, Validasi Metode, Uji Profisiensi, Kontrol Positif, dan <i>Rapid Test</i>) (Parameter)	29	29	29	29	29						
	b. Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Paramater Uji yang Terakreditasi Di UPT Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,	94	95	95	95	95						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Keamanan Hasil Perikanan (Parameter)											
	c. Jumlah Unit Kerja yang Dapat Melakukan Pengujian Parameter <i>Destructive Fishing</i> (Unit Kerja)	5	6	6	6	6						
	Lokasi Wilayah Perbatasan yang Terlayani dan Terawasi						3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	
	Tingkat Keberhasilan Pengawasan Di Wilayah Perbatasan (%)	77	78	79	80	81						
	Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan						9,3	14,0	17,0	20,0	27,1	
	a. Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian (<i>Official Control</i>) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit Kerja)	150	150	150	150	150						
	b. Jumlah UPT yang Menerapkan Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium (SNI 8340:2016) (Unit Kerja)	7	7	7	7	7						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	c. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 (unit kerja)	3	3	3	3	3						
	d. Jumlah UPT BKIPM yang Terakreditasi Menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang Terintegrasi (ISO 17020, ISO 9001, ISO17025) (Unit Kerja)	7	7	7	7	7						
	Tingkat Kepatuhan Entitas Terhadap Standar, Sistem dan Regulasi						2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	
	a. Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha yang Melalulintaskan Ikan dan Hasil Perikanan Terhadap Regulasi/Peraturan (%)	80	80	80	80	80						
	b. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Operasional Pemasukan dan Pengeluaran (%)	80	80	80	80	80						
	Unit Kerja yang Menerapkan Digitalisasi						5,6	5,6	5,6	6,7	6,7	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Standardisasi Pelayanan Publik											
	a. Jumlah Unit Kerja yang Menerapkan DILAN (Digitalisasi Pelayanan) (Unit Kerja)	47	47	47	47	47						
	b. Nilai Kepuasan Masyarakat Berbasis Digital Terhadap Layanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (nilai SKM unit kerja)	84	84	84	84	84						
	Parameter Uji yang Ditetapkan Sebagai Ruang Lingkup Acuan Tingkat Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan						0,8	0,8	0,8	1,8	1,8	
	Jumlah Parameter Uji yang Ditetapkan Sebagai Ruang Lingkup Acuan Tingkat Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan (Parameter)	6	6	6	6	6						
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan							114,9	119,0	126,2	129,4	138,1	627,5

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemetaan dan Pemantauan Logistik Hasil Perikanan						2,9	2,5	2,5	2,5	2,1	
	a. Jumlah Peta Logistik Ikan yang Disusun (Dokumen)	4	4	4	4	4						
	b. Implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (Lokasi)	3	3	3	3	3						
	c. Hasil Analisis Pemantauan Logistik Ikan (Dokumen)	12	12	12	12	12						
	Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan Dalam Koridor Logistik (Koridor)						1,6	1,9	1,8	1,8	1,8	
	a. Jumlah Koridor Rantai Pasok Hasil Perikanan yang Terkelola (Koridor)	5	5	5	5	5						
	b. Layanan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (Pelaku Usaha)	1	1	1	1	1						
	Pelaku Usaha Perikanan yang Dibina Dalam Rangka Pengadaan dan Penyimpanan Hasil Perikanan						0,7	1,8	0,8	0,8	1,5	
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Dibina Dalam Rangka Pengadaan	100	25	30	35	40						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dan Penyimpanan Hasil Perikanan												
	Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang Dibina Dalam Rangka Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan						0,6	0,5	0,7	0,6	0,6		
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Penyedia Layanan Jasa Logistik yang Dibina Dalam Rangka Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan	50	25	30	35	40							
	Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan						61,3	75,0	81,0	83,0	85,0		
	Jumlah Sarana Prasarana Pengadaan dan Penyimpanan Ikan yang Disediakan	31	35	35	40	45							
	Sarana Distribusi Hasil Perikanan yang Disediakan						30,0	31,7	33,0	35,1	42,1		
	Jumlah Sarana Distribusi Hasil Perikanan yang Disediakan	41	41	41	45	50							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Timika, Kabupaten Mimika yang Mandiri						15,4	4,2	4,0	3,0	3,0	
	Tingkat Kemandirian SKPT Timika (Skala 1-5)	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan Di Daerah						2,4	1,4	2,4	2,6	2,0	
	Jumlah Provinsi yang Difasilitasi Melakukan Penataan Rantai Pasok Hasil Perikanan (Provinsi)	34	34	34	34	34						
	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan						19,3	19,5	19,8	21,0	22,2	101,8
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Usaha Kelautan dan Perikanan						0,6	1,4	2,0	2,5	3,0	
	Jumlah Lembaga Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20	30	35	40	45						
	Terlaksananya Promosi Usaha dan Investasi						0,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
	Jumlah Promosi Usaha dan Investasi (Dokumen)	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Penumbuhan Wirausaha Kelautan Dan Perikanan						1,8	2,0	2,2	2,4	2,6	
	Jumlah Wirausaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan (Wirausaha)	200	200	200	200	200						
	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak, Kabupaten Biak Numfor yang Mandiri						12,0	4,0	3,0	3,0	3,0	
	Tingkat Kemandirian SKPT Biak (Tingkat Kemandirian Skala 1-5)	4	5	5	5	5						
	Fasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (Dekonsentrasi)						0,4	1,2	1,2	1,2	1,2	
	Provinsi yang Terfasilitasi Akses Pembiayaan Kredit Program (Provinsi)	10	34	34	34	34						
	Terselenggaranya <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i>						0,4	2,5	2,5	2,5	2,5	
	Jumlah <i>Marine and Fisheries Business and Investment Forum</i> yang diselenggarakan (Forum)	12	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	103,75	104,00	104,25	104,50	104,75						
	Ekonomi Sektor Kelautan Dan Perikanan Meningkatkan											
	a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	6,17	6,63	7,13	7,66	08.00						
	b. Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	56,39	58,08	59,53	61,02	62,05						
	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing											
	a. Keberterimaan Ikan dan Hasil Perikanan Di Negara Tujuan Ekspor (Negara)	137	137	137	137	137						
	b. Persentase Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Ekspor (%)	98	98	98	98	98						
	c. Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	80	80	80	80	80						
	d. Volume Produk Olahan Kelautan Dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	6,9	7,05	7,2	7,35	7,5						
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan						62,0	132,7	238,7	244,4	196,0	873,8
	Pengadaan Moda Sarana Pemasaran						4,7	5,0	6,0	5,8	5,7	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Sarana Pemasaran Roda 2/3 yang Disediakan (Paket)	50	50	50	50	50						
	Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)						19,5	22,0	30,0	32,0	34,0	
	a. Jumlah Menu Inovasi Masakan Berbahan Baku Ikan yang Dikembangkan (Produk)	68	68	68	68	68						
	b. Jumlah Lokasi Promosi Gemarikan (Provinsi)	34	34	34	34	34						
	Keikutsertaan Dalam Promosi Skala Internasional						10,0	11,5	13,2	14,0	15,0	
	Nilai Potensi Transaksi Dari Promosi Skala Internasional (Juta USD)	250	275	300	325	350						
	Sarana dan Prasarana Pemasaran yang Dibangun						18,3	30,0	31,2	34,3	38,0	
	a. Jumlah Pasar Ikan yang Dibangun (Unit)	4	2	2	2	2						
	b. Jumlah Sentra Kuliner yang Dibangun (Unit)	2	10	10	10	10						
	Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan						1,8	4,0	4,0	4,0	4,0	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	a. Jumlah Lokasi Pembinaan Pengelolaan Pasar Ikan (Lokasi)	11	17	23	29	34						
	b. Jumlah Perlengkapan Pedagang Ikan (Paket)	25	25	25	25	25						
	c. Pemeliharaan Pasar Ikan Modern (Bulan)	12	12	12	12	12						
	Peta Preferensi, Konsumsi, Dan Kebutuhan Ikan Konsumen Dalam Negeri (Provinsi)						3,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
	Peta Preferensi, Konsumsi, Dan Kebutuhan Ikan Konsumen Dalam Negeri (Provinsi)	34	34	34	34	34						
	Pemetaan Dan Strategi Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor yang Disusun						1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Jumlah Dokumen Pemetaan dan Strategi Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor yang Disusun (Dokumen)	12	12	12	12	12						
	Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional						-	55	150	150	95	
	Pasar Ikan Bertaraf Internasional yang Dibangun (unit)	0	3	3	3	3						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Partisipasi Daerah Dalam Mendukung Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan (Dekonsentrasi)						3,0	2,0	1,1	1,1	1,1	
	Provinsi yang Berpartisipasi Dalam Promosi Gemarikan, Pembinaan Pasar dan Peningkatan Akses Pasar (Provinsi)	34	34	34	34	34						
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan							33,4	34,4	39,2	44,9	48,6	200,4
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan yang Dirumuskan						1,9	0,7	0,7	0,7	0,7	
	Jumlah RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dirumuskan (RSNI)	15	15	15	15	15						
	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang Diterbitkan Bagi Unit Pengolahan Ikan						2,6	9,0	12,0	15,0	16,0	
	Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang Diterbitkan Bagi Unit Pengolahan Ikan (Sertifikat)	2250	2500	2750	3000	3250						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dibina (Unit)						3,3	2,4	2,0	2,0	2,0	
	a. Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Dibina (Unit)	400	400	400	400	400						
	b. Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Menengah dan Besar yang Dibina (Unit)	100	100	100	100	100						
	Utilitas dan Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku Unit Pengolahan Ikan						1,9	1,5	1,5	1,5	1,6	
	a. Persentase Utilitas UPI (Persen)	60	66	67	68	70						
	b. Pemetaan Kebutuhan Bahan Baku Untuk UPI ICS (Dokumen)	2	2	2	2	2						
	Fasilitasi Sarana Rantai Dingin dan Pengolahan Kepada UMKM						6,5	10,0	11,5	13,5	15,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin Dan Pengolahan yang Disediakan (Unit)	400	500	500	500	500						
	Ragam Baru Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah Di Lokasi yang Dibina						1,3	1,4	1,4	1,6	1,8	
	Jumlah Ragam Baru Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Bernilai Tambah Di Lokasi yang Dibina (Ragam)	28	28	28	28	28						
	Sarana dan Prasarana Unit Penanganan/Pengolahan Ikan yang Ditingkatkan Fasilitasnya						6,8	2,5	1,9	1,8	1,8	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Unit Penanganan/ Pengolahan Ikan yang Ditingkatkan Fasilitasnya (Unit)	10	20	30	40	50						
	UPI Bernilai Tambah Menuju <i>Zero Waste</i>						5,5	5,9	7,2	7,7	8,1	
	Jumlah UPI Bernilai Tambah yang Dibangun Menuju <i>Zero Waste</i> (Lokasi)	2	2	2	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Layanan Pra Penerbitan SKP Di Daerah (Dekonsentrasi)						3,6	1,0	1,0	1,1	1,1	
	Jumlah Layanan Pra Penerbitan SKP Di Daerah (Provinsi)	34	34	34	34	34						
Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan							9,0	11,9	15,1	18,5	22,2	76,7
	Rekayasa dan Uji Terap Produk Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang Dihasilkan						2,0	2,2	2,5	3,3	3,8	
	a. Jumlah Produk Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang Direkayasa (Produk)	10	10	10	10	10						
	b. Jumlah Produk Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang Diujiterapkan (Produk)	5	5	5	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Bahan RSNI Produk Kelautan Dan Perikanan yang Disiapkan						0,2	0,3	1,5	2,0	2,5	
	Jumlah Bahan RSNI Produk Kelautan dan Perikanan yang Disiapkan (Bahan RSNI)	3	3	3	3	3						
	Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan Dan Perikanan						1,2	1,8	2,1	2,5	2,8	
	Jumlah Layanan Sertifikasi SNI Produk Kelautan dan Perikanan (Produk)	60	70	80	90	100						
	Data Hasil Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan						1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	
	Jumlah Data Hasil Pengujian Nutrisi dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (Data Uji)	1000	1100	1200	1300	1400						
	Pelaku Usaha yang Dibina Dalam Inkubator Bisnis						3,5	5,0	5,5	6,3	7,0	
	Jumlah Pelaku Usaha yang Dibina Dalam Inkubator Bisnis (UMKM)	18	20	22	24	26						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Layanan Bisnis Pengembangan Usaha (Lokasi)	4	4	4	4	4						
	Diseminasi Informasi Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan						0,7	1,1	1,8	2,2	3,6	
	Jumlah Peserta Diseminasi Informasi Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan (Orang)	500	600	700	800	900						
Pengendalian Mutu							50,5	60,3	62,5	70,7	76,3	320,2
	Registrasi Unit Pengolahan Ikan Di Negara Tujuan Ekspor						0,9	1,0	1,1	1,3	1,4	
	Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Dokumen)	4	4	4	4	4						
	Laporan Pengawasan Kasus Mutu Ekspor Impor Produk Perikanan yang Ditangani						2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	
	Persentase Penanganan Kasus Mutu Ekspor Impor Produk Perikanan yang Diselesaikan (%)	100	100	100	100	100						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik						4,8	4,8	5,0	5,6	5,7	
	Penjaminan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	80	82	84	86	88						
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem <i>Traceability</i>						1,3	2,6	2,9	3,1	3,4	
	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem <i>Traceability</i> (UPI)	200	200	200	200	200						
	Operasional Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan						14,9	22,0	23,0	26,0	28,0	
	a. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Di Pintu Pemasukan Wilayah Republik Indonesia (%)	100	100	100	100	100						
	b. Persentase Jumlah Pengiriman (<i>Consignment</i>) Hasil Perikanan yang Memenuhi Persyaratan Negara Tujuan Ekspor (%)	98	98	98	98	98						
	c. Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Hasil Riset yang Dimanfaatkan Oleh Sektor Industri (Paket)	2	3	3	3	3						
	Iptek Hasil Kegiatan Riset KP yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat											
	Desa/Kawasan Mitra yang Menerapkan Iptek Kelautan dan Perikanan (Paket)	4	5	5	5	5						
	Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Digunakan untuk Penyusunan Kebijakan											
	a. Rekomendasi Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Digunakan Dalam Penyusunan Kebijakan (Paket)	24	24	28	28	30						
	b. Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Digunakan Sebagai Bahan Penyusunan RSNI (Paket)	1	1	1	1	1						
	c. Data, Informasi, dan Peta Hasil Riset Kelautan dan Perikanan yang Digunakan Dalam	11	11	11	11	11						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Penyusunan Kebijakan (Paket)												
	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat						0,5	0,6	0,6	0,7	0,7		
	Persentase Peningkatan PNBP SDMKP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan							14,4	15,3	16,4	17,5	18,6	82,2	
	Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan						1,3	1,5	1,8	1,7	1,8		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Paket)	7	7	7	7	7							
	Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan						2,5	3,4	4,4	5,4	6,4		
	Jumlah Teknologi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Paket)	6	6	7	7	7							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Data dan/atau Informasi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang Dihasilkan						1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang Dihasilkan (Paket)	5	5	5	5	5						
	Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan						8,3	7,8	7,5	7,5	7,4	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan											
	Jumlah Penerapan TAL Hasil Riset Pengolahan Produk	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Kelautan dan Perikanan (Paket)												
	Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan						8,4	10,6	11,7	12,3	13,4	56,4	
	Data dan/atau Informasi Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan						0,7	0,7	0,8	0,9	0,9		
	Jumlah Data dan/atau Informasi Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	1	1	1	1							
	Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan						4,3	6,5	7,5	8,0	9,0		
	Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan (Paket)	6	6	6	6	6							
	Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan						1,3	1,3	1,3	1,3	1,4		
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	10	10	12	12	14							

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sarana Dan Prasarana Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan						1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	1	1	1	1						
	Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan						1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	
	Jumlah Penerapan Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	1	1	1	1						
Riset Perikanan							75,1	101,1	115,7	119,8	130,8	542,5
	Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan						3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan (Paket)	15	15	18	20	20						
	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)						20,0	25,0	28,2	30,8	33,5	

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan Di WPPNRI	11	11	11	11	11						
	Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan Pada WPPNRI Di Perairan Darat						4,2	5,0	6,5	8,2	8,2	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan Pada WPPNRI Di Perairan Darat (Paket)	8	10	12	14	14						
	Teknologi Hasil Riset Perikanan						13,2	20,0	22,0	24,0	26,0	
	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan (Paket)	23	30	30	30	30						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Perikanan						1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	
	Jumlah Penerapan TAL Hasil Riset Perikanan (Inovasi)	3	6	6	7	7						
	Sarana Dan Prasarana Riset Perikanan						18,7	32,0	39,3	37,0	43,3	
	Jumlah Sarana Dan Prasarana Riset Perikanan (Unit)	10	12	12	12	12						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Produk Biologi Hasil Riset Perikanan						5,9	5,9	6,0	6,0	6,0	
	Jumlah Produk Biologi Hasil Riset Perikanan (Paket)	15	15	16	17	18						
	Data Dan/Atau Informasi Hasil Riset Perikanan						4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan (Paket)	10	11	11	11	11						
	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan						1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	
	Jumlah Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan (Paket)	2	2	2	2	2						
	Alat Dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna						1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	
	Jumlah Alat Dan Mesin Hasil Riset Perikanan Siap Guna (Paket)	2	2	2	2	2						
	Layanan Penelitian dan Pengembangan						1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	
	Jumlah Layanan Penelitian dan Pengembangan (Layanan)	1	1	1	1	1						
Riset Kelautan							61,1	75,0	78,1	84,5	96,3	395,0

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumber Daya Kawasan Pesisir						3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumber Daya Kawasan Pesisir (Kawasan)	10	10	12	12	13						
	Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut Di WPPNRI						1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	
	Jumlah Data dan/atau Informasi Pemetaan Karakteristik dan Dinamika Laut Di WPPNRI (Paket)	2	2	3	4	4						
	Sarana dan Prasarana Riset Kelautan						33,2	43,0	40,2	42,2	48,6	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Kelautan (Unit)	7	7	7	7	7						
	Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan						2,0	2,1	2,2	2,4	2,5	
	Jumlah Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan (Paket)	4	4	4	5	5						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna						0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	
	Jumlah Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna (Paket)	1	1	1	2	2						
	Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan						1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan (Paket)	12	12	12	12	12						
	Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan						0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	
	Jumlah Penerapan TAL Hasil Riset Kelautan (Paket)	1	1	2	2	2						
	Sarana Dan Prasarana Riset Data Satelit Radar						13,9	15,0	18,0	19,0	22,0	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Riset Data Satelit Radar (<i>Scene</i>) (Paket)	500	500	500	500	500						
	Sarana dan Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar						4,4	5,5	6,5	8,0	8,5	
	Jumlah Sarana dan	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)					TOTAL 2020- 2024 (Rp. Miliar)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Prasarana Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar (Unit)												
	Layanan Penelitian dan Pengembangan						0,5	0,6	0,7	0,8	0,9		
	Jumlah Layanan Penelitian dan Pengembangan (Layanan)	1	1	1	1	1							

Tabel 6. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2020-2024 (menjadi)

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Kementerian Kelautan dan Perikanan			6.931.021	
Sasaran Strategis 1	Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Berkelanjutan			
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	<80		
	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,3		
Sasaran Strategis 2	Ekonomi Sektor Kelautan Dan Perikanan Meningkat			
	Pertumbuhan PDB perikanan (%);	5-7		
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	7,2		
	Konsumsi ikan (Kg/Kapita/Tahun)	59,00		
Sasaran Strategis 3	Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan Meningkat			
	Persentase lulusan pendidika dan pelatihan kelautan dan perikanan yang terserap DUDI (%)	72,00		
Sasaran Strategis 4	Tata Kelola SDKP Bertanggung Jawab			
	WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur (WPPNRI);	11,00		
	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	21,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Strategis 5	Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing			
	Produksi perikanan (Juta Ton)	30,85		
	Produksi garam (Juta Ton)	2,00		
	Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	70,00		
	Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP (Triliun Rupiah)	10,73		
Sasaran Strategis 6	Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan Efektif			
	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	98,00		
Sasaran Strategis 7	Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas			
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) KKP (Indeks)	80,00		
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP (Nilai)	93,76		
Program Dukungan Manajemen			3.725.070	
Sasaran Program 1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah di Lingkungan KKP			Inspektorat Jenderal
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan KKP (%)	≤ 0,5		
	Tingkat maturitas SPIP KKP (Nilai)	3,30		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Unit kerja KKP berpredikat menuju WBK (Unit)	106		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP KKP (Unit)	84		
	Nilai integritas KKP (Nilai)	8,50		
	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan KKP (%)	82,00		
	Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN di lingkungan KKP (%)	82,00		
	Tingkat efektivitas pengawasan pengadaan barang dan jasa di lingkungan KKP (%)	82,00		
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan KKP (%)	80,00		
	Tingkat kapabilitas ITJEN (Nilai)	3,50		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup ITJEN (Indeks)	85,00		
	Unit kerja ITJEN yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup ITJEN (%)	88,00		
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran ITJEN (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran ITJEN (%)	86,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup KKP (Rekomendasi)	18,00		
	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup ITJEN (%)	89,00		
	Persentase kepatuhan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan lingkup ITJEN (%)	80,00		
	Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan ITJEN (Indeks)	4,2		
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP			38.388	Inspektorat Jenderal
Sasaran Kegiatan	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra			
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan mitra Inspektorat (%)	≤ 1%		
	Nilai maturitas SPIP mitra inspektorat (Nilai)	3,30		
	Unit kerja mitra Inspektorat berpredikat menuju WBK (jumlah akumulasi) (Unit)	106		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP mitra Inspektorat (Nilai)	82,5		
	Tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup mitra Inspektorat (%)	82,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat (%)	82,00		
	Tingkat efektivitas pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup mitra Inspektorat (%)	82,00		
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat (%)	80,00		
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup mitra Inspektorat (Rekomendasi)	18		
	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standard mutu pengawasan lingkup Inspektorat (%)	89,00		
	Persentase tingkat kepatuhan pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan lingkup Inspektorat (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja lingkup Inspektorat (%)	100,00		
	Terkelolanya anggaran kegiatan secara tertib dan akuntabel lingkup Inspektorat (%)	100,00		
	Nilai integritas KKP (Nilai)	80,50		
	Persentase jumlah rekomendasi pengawasan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP (%)	70,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup KKP (%)	100,00		
	Terkelolanya pelaporan strategi nasional pencegahan korupsi secara tertib dan akuntabel lingkup KKP (%)	100,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Inspektorat Jenderal			48.867	Inspektorat Jenderal
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal yang Optimal			
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Itjen (%)	≤ 0,5		
	Tingkat kapabilitas Itjen KKP (Nilai)	3,50		
	Tingkat maturitas SPIP Itjen (Nilai)	3,30		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Itjen (Nilai)	82,50		
	Indeks profesionalitas ASN Itjen (Indeks)	85,00		
	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Itjen KKP (%)	94,00		
	Persentase implementasi sistem informasi pengawasan lingkup Itjen KKP (%)	88,00		
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran (Nilai)	86,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti lingkup Itjen KKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Itjen KKP (%)	82,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Itjen KKP (%)	82,00		
	Indeks persepsi pegawai KKP terhadap kinerja pengawasan Itjen (Indeks)	4,16		
	Persentase pengelolaan data hasil pengawasan secara tertib dan handal (%)	100,00		
	Persentase publikasi informasi dan kinerja pengawasan intern KKP secara aktual (%)	100,00		
	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai itjen secara tepat waktu (%)	100,00		
	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Itjen (%)	100,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan barang persediaan lingkup Itjen KKP (%)	100,00		
Sasaran Program 2	Tata kelola pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Jenderal			Sekretariat Jenderal
	Indeks RB KKP (Indeks)	80,00		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup KKP (Indeks)	85,00		
	Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (Indeks)	95,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai kinerja anggaran KKP (Nilai)	86,00		
	Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (nilai)	76,00		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar lingkup KKP (%)	94,00		
	Batas tertinggi persentase nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal (%)	≤ 0,5		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal (%)	95,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Sekretariat Jenderal (Unit)	5		
Legislasi, Litigasi dan Kerja Sama			22.003	
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Internasional			Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
	Persentase kesepakatan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan yang ditindaklanjuti (%)	95		
	Persentase Kepuasan terhadap layanan perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (%)	88		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase posisi/rekomendasi/prakarsa Indonesia di bidang kelautan dan perikanan yang diterima di forum internasional (%)	93		
	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral di bidang kelautan dan perikanan (%)	100		
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kerja Sama Antarlembaga			Biro Perencanaan
	Persentase kontribusi kerja sama bidang KP terhadap program prioritas (%)	80		
	Persentase dokumen/naskah kerja sama yang disetujui pimpinan para pihak (%)	95		
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Penyiapan Produk Hukum KKP			Biro Hukum
	Indeks reformasi hukum KKP (Indeks)	80		
	Indeks kualitas kebijakan KKP (Indeks)	65		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan Menteri di Lingkungan KKP (%)	100		
	Permasalahan hukum melalui jalur pengadilan/litigasi di lingkungan KKP yang Ditangani (%)	100		
	Permasalahan hukum di luar jalur pengadilan/nonlitigasi di lingkungan KKP yang ditangani (%)	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Perjanjian nasional bidang kelautan dan perikanan yang siap untuk ditandatangani (%)	100		
	Instrumen hukum internasional bidang kelautan dan perikanan yang diberikan pertimbangan hukum (%)	100		
	Nilai kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KKP (Nilai)	92		
Pengelolaan Organisasi dan SDM			15.391	
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi			Biro SDM Aparatur dan Organisasi
	Indeks sistem merit KKP (Indeks)	393		
	Indeks profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal (Indeks)	85		
	Indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN (Indeks)	75		
	Indeks pembinaan jabatan fungsional KKP (Indeks)	71		
	Nilai kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi KKP (Nilai)	65		
	Persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP (%)	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Penetapan penghargaan ASN bidang kelautan dan perikanan tingkat nasional (Nilai)	4		
	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi KKP (Nilai)	4		
	Indeks BerAKHLAK KKP (Indeks)	65		
	Persentase rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional daerah (%)	80		
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			50.887	
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja			Biro Perencanaan
	Nilai SAKIP KKP (Nilai)	84		
	Persentase proyek PHLN KKP yang berstatus at risk (%)	60		
	Persentase dokumen pendanaan luar negeri KKP yang teregister (%)	95		
	Capaian IKU KKP (%)	70		
	Capaian prioritas nasional KKP (%)	91		
	Nilai komponen penetapan tujuan pada maturitas SPIP KKP (Nilai)	1,8		
	Persentase pelaksanaan kegiatan lintas sektor (%)	83		
	Indeks perencanaan pembangunan nasional KKP (Indeks)	84		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (Nilai)	84		
	Persentase kesesuaian rencana kerja yang ditetapkan dengan rencana strategis (%)	72		
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Keuangan dan BMN			Biro Keuangan
	Opini BPK atas laporan keuangan KKP (Opini)	WTP (5)		
	Indeks Pengelolaan Keuangan KKP (Indeks)	73,25		
	Level maturitas SPIP KKP (Level)	3		
	Indeks pengelolaan aset KKP (Indeks)	3,35		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran KKP (Nilai)	93,76		
	Indeks Pengelolaan BLU KKP (Indeks)	3		
	Nilai pengelolaan PNBPN sektor kelautan dan perikanan (Nilai)	100		
	Nilai kinerja pembinaan BLU (NKP BLU) sektor kelautan dan perikanan (Nilai)	75		
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Sekretariat Jenderal dibandingkan realisasi anggaran Sekretariat Jenderal TA 2023 (%)	≤ 0,5		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal (%)	95		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Jenderal (Nilai)	86		
	Tingkat kepatuhan BMN Sekretariat Jenderal (persen)	82,50		
	Nilai implementasi standar biaya keluaran KKP (Nilai)	100		
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum			454.755	
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
	Nilai dimensi input pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (Nilai)	96,90		
	Nilai dimensi proses pengelolaan informasi dan komunikasi publik KKP (Nilai)	93,30		
	Nilai keterbukaan Informasi Publik KKP (Nilai)	94		
	Persentase efektivitas layanan hubungan lembaga kepada mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan (%)	89		
	Nilai Kepuasan Terhadap Layanan Perpustakaan KKP (Nilai)	88		
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Administrasi,			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Pengadaan Barang/Jasa dan Ketatausahaan Pimpinan			
	Tingkat digitalisasi arsip KKP (Nilai)	81		
	Indeks tata kelola pengadaan KKP (Indeks)	80		
	Nilai realisasi pagu paket yang dilakukan tender dibandingkan total pagu paket yang diumumkan dalam RUP (Nilai)	5		
	Persentase pelaksanaan layanan pimpinan (%)	88		
	Indeks kepuasan terhadap layanan kerumahtanggan kantor pusat (%)	85		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa			Biro Umum dan PBJ
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	80		
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (%)	100		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Umum dan PBJ (Nilai)	84		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Indeks profesionalitas ASN Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Indeks)	85		
	Persentase unit kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar (%)	94		
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Biro Umum dan PBJ (Nilai)	82		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Perencanaan			Biro Perencanaan
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Perencanaan (Nilai)	75		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Perencanaan (Nilai)	84		
	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Perencanaan (Indeks)	85		
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Perencanaan (%)	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan (%)	95		
	Persentase unit kerja Biro Perencanaan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perencanaan, penganggaran, kinerja, dan kerjasama antarlembaga (%)	100		
	Persentase penyerapan anggaran Biro Perencanaan (%)	95		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro SDMAO			Biro SDM Aparatur dan Organisasi
	Nilai minimal yang dipersyaratkan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro SDMAO (Nilai)	75		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro SDMAO (Nilai)	84		
	Indeks Profesionalitas ASN Biro SDMAO (Indeks)	85		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	undangan bidang pengelolaan SDM aparatur dan organisasi (%)			
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Biro SDMAO (%)	100		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro SDMAO (%)	80		
	Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Biro SDMAO (%)	94		
	Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDMAO (%)	95		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hukum			Biro Hukum
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Hukum (Nilai)	84		
	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Biro Hukum (Indeks)	85		
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Hukum (%)	100		
	Persentase unit kerja Biro Hukum yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94		
	Persentase Penyerapan Anggaran Biro Hukum (%)	95		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro Hukum (%)	95		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penyiapan produk hukum KKP (%)	100		
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Hukum (Nilai)	75		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri			Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	100		
	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	84		
	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Indeks)	85		
	Persentase unit kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	94		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)			
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di Lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	100		
	Persentase penyerapan anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (%)	95		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang hubungan masyarakat dan kerja sama luar negeri (%)	100		
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (Nilai)	75		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Biro Keuangan			Biro Keuangan
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Biro Keuangan (Nilai)	75		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan BMN (%)	100		
	Indeks profesionalitas ASN di Lingkungan Biro Keuangan (Indeks)	85		
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Biro Keuangan (%)	100		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Biro Keuangan (Nilai)	84		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Biro Keuangan (%)	95		
	Persentase unit kerja Biro Keuangan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94		
	Persentase penyerapan anggaran Biro Keuangan (%)	95		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin)			Pusat Data, Statistik, dan Informasi
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Pusdatin (Nilai)	84		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-	100		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP (%)			
	Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin (%)	100		
	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin (Indeks)	85		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin (%)	80		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pusdatin (%)	94		
	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (%)	95		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP)			Pusat Data, Statistik, dan Informasi
	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar di BPISDKP (%)	94		
	Indeks profesionalitas ASN BPISDKP (Indeks)	83		
	Nilai indikator kinerja pelaksana anggaran BPISDKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPISDKP (Nilai)	86		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase penyelesaian temuan BPK di BPISDKP (%)	100		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPISDKP (%)	95		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP BPISDKP (Nilai)	84		
	Nilai kepuasan pelanggan pelayanan publik BPISDKP ((Nilai)	95		
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkup BLU LPMUKP			LPMUKP
	Nilai penilaian mandiri SAKIP BLU LPMUKP (Nilai)	84		
	Nilai kinerja anggaran (NKA) BLU LPMUKP (Nilai)	86		
	Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup BLU LPMUKP (%)	94		
	Persentase penyelesaian temuan BPK tahun 2023 lingkup BLU LPMUKP (%)	100		
	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BLU LPMUKP (%)	95		
	Persentase penyerapan realisasi anggaran (%)	90		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Pengelolaan data dan Informasi			74.887	
Sasaran Kegiatan	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan			Pusat Data, Statistik, dan Informasi
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan (%)	91		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Setjen (%)	94		
	Indeks layanan aplikasi sistem informasi (Indeks)	3,5		
	Persentase layanan sistem informasi pusat kontrol maritim (%)	76		
	Indeks SPBE KKP (Indeks)	3,05		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik di lingkungan KKP (Nilai)	76		
	Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi (%)	76		
	Tingkat kematangan keamanan siber KKP (Indeks)	2,5		
	Tingkat maturitas satu data kelautan dan perikanan (%)	70		
	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur SPBE KKP (Nilai)	3		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral KKP (Nilai)	2,75		
	Indeks pelayanan publik KKP (Indeks)	4,59		
	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik KKP (Nilai)	85		
	Survei kepuasan masyarakat (SKM) KKP (Nilai)	88,3		
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			BPISDKP
	Persentase jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terverifikasi, tervalidasi dan termanfaatkan (%)	100		
	Persentase data citra satelit radar yang dikelola menjadi data geospasial kelautan dan perikanan (%)	90		
Sasaran Program 3	PNBP BLU Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat			Sekretariat Jenderal
	Persentase pencapaian target PNBP layanan BLU LPMUKP (%)	97,00		
	Persentase penyaluran dana bergulir BLU LPMUKP (%)	90,00		
Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			41.739	
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			BLU LPMUKP

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Realisasi PNBP Layanan Badan Layanan Umum (Rupiah)	30.000.000.000		
	Realisasi penyaluran pinjaman dana bergulir BLU LPMUKP (Rupiah)	470.000.000.000		
	Persentase hasil perhitungan capaian rasio dana bergulir diragukan tertagih (%)	100		
	Penyelesaian modernisasi badan layanan umum (Nilai)	80		
	Indeks kepuasan pemanfaatan atas layanan lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan (Indeks)	85		
	Persentase peningkatan usaha debitur penerima pelatihan/pendampingan usaha (%)	80		
Sasaran Program 4	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PKRL			Ditjen PKRL
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PKRL (Indeks)	88,00		
	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PKRL (Unit)	8,00		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen PKRL (%)	≤ 0,5		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen PKRL (Nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PKRL (Nilai)	3,3		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PKRL (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PKRL (Nilai)	76,00		
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PKRL (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Ditjen PKRL (Nilai)	86,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PKRL (%)	91,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL)			220.947	
Sasaran Kegiatan	Layanan Dukungan Manajemen Lingkup Ditjen PKRL			
	Unit kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PKRL (Kumulatif) (Unit)	8,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PKRL (%)	≤0,5		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PKRL (Indeks)	88,00		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PKRL (Nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PKRL (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PKRL (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik lingkup Ditjen PKRL (Unit Kerja)	76,00		
	Nilai IKPA Ditjen PKRL (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Ditjen PKRL (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PKRL (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data KP di Lingkungan Ditjen PKRL (%)	91,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Program 5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap			Ditjen Perikanan Tangkap
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	80,00		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	≤ 0,5		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap-(%)	80,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Unit Kerja)	15,00		
	Penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3		
	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	84,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase unit kerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	94,00		
	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	76,00		
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	91,00		
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	93,76		
	Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	86,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			472.235	Setditjen Perikanan Tangkap
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap			
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis di lingkungan (%)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%)	80,00		
	Nilai pembangunan zona integritas menuju WBK (Nilai)	75,00		
	Nilai PM pembangunan ZI pelabuhan perikanan (Nilai)	80,00		
	Nilai survei kepuasan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	88,3		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	84,00		
	Nilai rekonsiliasi kinerja Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	94,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan spip di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (Nilai)	3,3		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	84,00		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang - undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100,00		
	Persentase penyelesaian masalah hukum lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (%)	100,00		
	Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra (%)	81,00		
	Unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	1		
	Persentase lembar kerja data produksi yang tervalidasi (%)	100,00		
	Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi di lingkungan (%)	100,00		
	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap, UPT Pusat DJPT, Dekon dan TP (Nilai)	93,76		
	Persentase penyerapan anggaran Unit Es II Ditjen Perikanan Tangkap (%)	98,00		
	Nilai kinerja anggaran di lingkungan UPT Pusat, Dekon, dan TP (Nilai)	86,00		
Sasaran Program 6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya			Ditjen Perikanan Budi Daya
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Indeks)	85,00		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	≤ 0,5		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	82,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja Ditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK di Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Unit)	14,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	76,00		
	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	91,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi daya			396.501	Setditjen Perikanan Budi Daya
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budi Daya			
	Nilai PM SAKIP Setditjen Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	84,00		
	Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA (%)	80,00		
	Persentase data realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) lahan pembudidayaan ikan yang terintegrasi (%)	100,00		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi-Daya (Indeks)	85,00		
	Indeks pengelolaan SDM aparatur Ditjen Perikanan Budi-Daya (Indeks)	3,00		
	Persentase dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti bidang perikanan budi daya (%)	90,00		
	Batas tertinggi prosentase nilai temuan LHP BPK Ditjen Perikanan Budi Daya	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	dibandingkan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi-Daya Tahun 2024 (%)			
	Indeks pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya (Indeks)	75,00		
	Persentase penyelesaian peraturan perundangan bidang perikanan budi daya (%)	100,00		
	Nilai rata-rata hasil panel penilaian unit kerja berpredikat menuju WBK oleh tim penilai KKP (Nilai)	76,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	3,30		
	Unit kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86,00		
	Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Persentase permasalahan hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang ditangani (%)	65,00		
	Persentase jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya (%)	≥ 86		
	Nilai pengawasan kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (%)	80,00		
	Persentase unit pelayanan publik yang melaksanakan PEKPPP mandiri (%)	75,00		
Sasaran Program 7	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PDSPKP			Ditjen PDSPKP
	Unit kerja berpredikat menuju WBK di lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Ditjen PDSPKP (%)	≤ 0,5		
	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP (Indeks)	87		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	84,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase unit kerja Ditjen PDSPKP yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	94		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PDSPKP (Nilai)	76		
	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Ditjen PDSPKP(Nilai)	86		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP (%)	80		
	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP (%)	80		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP (%)	91		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJ PDSPKP			147.403	Setditjen PDSPKP
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP			
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,30		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Indeks profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen PDSPKP (Indeks)	87,00		
	Penilaian mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	84,00		
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	100,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	80,00		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Ditjen PDSPKP (%)	80,00		
	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN Ditjen PDSPKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan data Ditjen PDSPKP (%)	91,00		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Ditjen PDSPKP (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai pengawasan kearsipan di unit kearsipan Ditjen PDSPKP (Nilai)	75,00		
	Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (%)	80,00		
	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	≤5		
	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100,00		
	Nilai penilaian mandiri pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	4,01		
	Persentase pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100,00		
	Persentase data produksi KP yang tervalidasi lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100,00		
	Persentase realisasi data geospasial yang terintegrasi lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP (%)	100,00		
	Presentase pemenuhan layanan internal/overhead lingkup Ditjen PDSPKP (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP (bulan)	12,00		
Sasaran Program 8	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Ditjen PSDKP			Ditjen PSDKP
	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang Pengawasan SDKP (Indeks)	70,00		
	Unit kerja-berpredikat menuju WBK di Lingkup Ditjen PSDKP (Unit)	15,00		
	Indeks profesionalitas ASN Ditjen PSDKP (Indeks)	82,00		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP Ditjen PSDKP (Nilai)	84,00		
	Nilai hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik Ditjen PSDKP (Nilai)	76,00		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas laporan keuangan Ditjen PSDKP(%)	≤ 0,5		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP (Nilai)	3,3		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Ditjen PSDKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa Ditjen PSDKP (%)	80,00		
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	80,00		
	Nilai IKPA Ditjen PSDKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran Ditjen PSDKP (Nilai)	86,00		
	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	85,00		
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP			348.359	Setditjen PSDPKP
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP			
	Indeks efektivitas pengelolaan data dan informasi lingkup Ditjen PSDKP (Indeks)	80,00		
	Nilai internal keterbukaan informasi publik Ditjen PSDKP (Nilai)	60,00		
	Persentase pemberitaan netral dan positif tentang pengawasan SDKP (%)	85,00		
	Persentase implementasi kerja sama luar negeri (%)	80,00		
	Persentase dokumen kerja sama dalam negeri yang ditandatangani (%)	80,00		
	Indeks efektivitas kinerja sekretariat RPOA-IUU (Indeks)	80,00		
	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	70,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP (Indeks)	80,00		
	Persentase pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat lingkup Ditjen PSDKP (%)	100,00		
	Indeks kualitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (Indeks)	70,00		
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP (%)	100,00		
	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP (%)	80,00		
	Unit kerja Ditjen PSDKP berpredikat menuju WBK (Unit)	15,00		
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	75,00		
	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP (%)	100,00		
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PSDKP (%)	<0,5%		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	82,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Tingkat pemahaman peserta pelatihan/bimtek lingkup Setditjen PSDKP (Nilai)	77,00		
	Tingkat kelulusan peserta pelatihan/diklat teknis lingkup Setditjen PSDKP (Tingkat)	82,00		
	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (Nilai)	84,00		
	Inovasi yang dihasilkan lingkup Setditjen. PSDKP (Inovasi)	1,00		
	Persentase pelaksanaan pengelolaan inovasi lingkup Ditjen PSDKP (%)	100,00		
	Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)	21,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa (%)	80,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Setditjen PSDKP (%)	94,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	80,00		
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Setditjen PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80,00		
	Nilai IKPA lingkup (Setditjen, UPT & Dekonsentrasi) (Nilai)	93,76		
	Persentase realisasi anggaran lingkup (Unit Eselon II Teknis lingkup Ditjen PSDKP) (%)	99,4		
	Nilai kinerja anggaran lingkup (Setditjen, UPT & Dekonsentrasi) (Nilai)	82,00		
Sasaran Program 10	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPSDMKP		1.098.289	BPPSDMKP
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDMKP (Unit)	17		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5		
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	79,00		
	Penilaian mandiri SAKIP BPPSDMKP (nilai)	81,00		
	Nilai Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPPSDMKP (Nilai)	3,30		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPSDMKP (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDMKP (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan BMN BPPSDMKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPSDMKP (%)	80,00		
	Pendidikan dan pelatihan aparatur (Orang)	5423,00		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan			1.084.289	Sekretariat BPPSDMKP
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPSDMKP			
	Indeks profesionalitas ASN BPPSDMKP (Indeks)	79,00		
	Unit kerja berpredikat menuju WBK lingkungan BPPSDMKP (Unit)	17,00		
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK-RI atas LK BPPSDMKP (%)	≤0,5		
	Penilaian mandiri SAKIP BPPSDMKP (Nilai)	81,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP BPPSDMKP (Nilai)	3,30		
	Persentase unit kerja BPPSDMKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPSDMKP (%)	82,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPSDMKP (%)	76,00		
	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMKP (Nilai)	93,76		
	Nilai kinerja anggaran BPPSDMKP (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPSDMKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BPPSDMKP (%)	80,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana BPPSDMKP tepat waktu (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Terpenuhinya Layanan Perkantoran			
	Persentase pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan lingkup BPPSDMKP tepat waktu (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase pemenuhan layanan perkantoran BPPSDMKP tepat waktu (%)	100,00		
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP			14.000	Sekretariat BPPSDMKP
Sasaran Kegiatan	Aparatur yang Didik Dan Dilatih			
	Aparatur KKP yang diberikan beasiswa (Orang)	190,00		
	Aparatur KKP yang diberikan izin belajar (Orang)	68,00		
	Aparatur KKP yang mendapat pendidikan dan pelatihan (Diklat) (Orang)	5165,00		
Sasaran Program 11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)			BPPMHKP
	Unit kerja yang dilakukan pembangunan menuju WBK lingkup BPPMHKP (Unit)	5,00		
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan unit kerja BPPMHKP (Nilai)	3,00		
	Indeks profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Indeks)	86,00		
	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (nilai)	82,00		
	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BPPMHKP (%)	≤0,5		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Nilai hasil proposal inovasi pelayanan publik BPPMHKP (%)	76,00		
	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Nilai IKPA lingkup BPPMHKP (Nilai)	94,00		
	Nilai kinerja anggaran lingkup BPPMHKP (Nilai)	86,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100,00		
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks)	3,60		
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			294.420	Sekretariat BPPMHKP
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan BPPMHKP			
	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja menuju WBK (Nilai)	70,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP (Nilai)	3,00		
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Indeks)	86,00		
	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	78,00		
	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP (%)	100,00		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja lingkup BPPMHKP (Inovasi)	1,00		
	Persentase unit kerja BPPMHKP yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94,00		
	Nilai IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	94,00		
	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP (Nilai)	82,00		
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian program penyusunan perundang-undangan lingkup BPPMHKP (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Program Kualitas Lingkungan Hidup			105.603	
Sasaran Program 1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan			
	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	17,8		
	Luas kawasan konservasi (Juta Ha)	29,3		
Sasaran Program 2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan			
	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis)	20		
Sasaran Program 3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (Kawasan)	70		
Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut			67.331	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di Tingkat Nasional dan/atau Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ribu Ha)	200		
Sasaran Kegiatan	Tertatanya Kawasan Konservasi yang Operasional			
	Luas kawasan konservasi yang operasional (kumulatif) (Juta Ha)	17,80		
Sasaran Kegiatan	Termanfaatkannya Kawasan Konservasi Secara Berkelanjutan			
	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif) (Ha)	17,80		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang Dilindungi dan/atau yang Dilestarikan			
	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang terancam punah dan/atau dilindungi dan/atau dilestarikan (Jenis)	20		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara Berkelanjutan			
	Jenis keanekaragaman hayati dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola pemanfaatannya secara berkelanjutan (Jenis)	9		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerja Sama, Jejaring, dan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang Efektif			
	Jejaring, kemitraan, kerja sama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut yang diimplementasikan (Kerja Sama)	13		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Mendukung Konservasi			
	Kelompok penggerak konservasi yang mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut (Kelompok)	20		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Mandiri			
	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai (Skala 1-5)	-		
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			38.272	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Ketangguhannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap	7		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)			
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kawasan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	4		
	kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (Kawasan)	10 (100 ha mangrove)		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran			
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran (Kawasan)	49		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			2.506.397	
Sasaran Program 1	Kesejahteraan Nelayan Meningkat			
	Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Nilai)	107-110		
Sasaran Program 2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi Daya			
	Nilai Tukar Pembudi daya Ikan (NTPi) (Nilai)	105		
	Rata-rata pendapatan pembudi daya (Rp)	4.800.000		
Sasaran Program 3	Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Produksi perikanan budi daya (ikan) (Juta Ton)	12.52		
	Produksi perikanan budi daya (rumput laut) (Juta Ton)	12.33		
	Produksi Ikan hias (Miliar Ekor)	1.73		
Sasaran Program 4	Pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan			
	Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budi daya	50		
	korporasi pembudi daya ikan yang dikembangkan (Korporasi)	15		
Sasaran Program 5	Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif			
	Indeks kinerja penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80		
Sasaran Program 6	Kesadartahuan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan SDKP Meningkat			
	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab (Nilai)	74		
	Persentase Pokmaswas yang aktif mendukung pengawasan SDKP (%)	89		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Program 7	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Efektif			
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	100,00		
	Indeks kinerja operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	91,00		
	Indeks kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81,00		
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (Indeks)	80,00		
Sasaran Program 8	Penanganan Tindak Pidana Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif			
	Indeks kinerja penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	86,00		
Sasaran Program 9	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat			
	Nilai tukar petambak garam (Nilai)	101,75		
Sasaran Program 10	Terwujudnya Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan			
	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Nilai)	9,00		
	Kinerja logistik hasil perikanan (Indeks)	71,9		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Pembiayaan usaha KP melalui kredit program (Rp.Triliun)	10,26		
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BPPMHKP (Indeks)	3,65		
	Rasio pengendalian ekspor dan antararea jenis ikan yang dilarang, dilindungi, dan dibatasi (%)	90,00		
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit (jumlah produk sesuai persyaratan Indonesia/total impor yang masuk) (%)	100,00		
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan (%)	81,00		
Sasaran Program 11	Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
	Jumlah jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (Ragam)	4,00		
	Jumlah pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana dan prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11,00		
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa kelautan (Rp.Triliun)	1,70		
Sasaran Program 12	Sumber Daya Perikanan Tangkap Berkelanjutan			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	≤80		
Sasaran Program 13	Produktivitas Perikanan Budi Daya Meningkat			
	Produksi perikanan budi daya (Juta Ton)	24,85		
Sasaran Program 14	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			
	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan (Kawasan)	21,00		
	Persentase penyelesaian persyaratan dasar perizinan pemanfaatan ruang laut (%)	100,00		
Sasaran Program 15	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat			
	Produksi garam (Juta Ton)	2,0		
Sasaran Program 16	Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari			
	Kawasan wisata bahari (Kawasan)	10,00		
Sasaran Program 17	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya			
	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	7,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Program 18	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan yang Digunakan Untuk Penyusunan Kebijakan			
	Hasil perumusan kebijakan responsif KP yang digunakan untuk penyusunan kebijakan (Rekomendasi Kebijakan)	8		
Sasaran Program 19	Tata Kelola Sumber Daya Perikanan Tangkap Bertanggung Jawab			
	WPPNRI yang menjalankan penangkapan ikan terukur	11		
Sasaran Program 20	Produktivitas Perikanan Tangkap meningkat			
	Produksi perikanan tangkap (Juta Ton)	6,00		
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan			71.695	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Wisata Bahari dan BMKT			
	kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari (Kawasan)	8		
	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Lahan Garam			
	Lahan garam yang difasilitasi (Ha)	75		
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi (Unit)	25		
	Sarana dan/atau di kawasan garam terpadu yang dibangun (Unit)	6		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Pengelolaan Reklamasi			
	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan reklamasinya (Lokasi)	5,00		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola Untuk Bangunan dan Instalasi di Laut			
	Lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi di laut (Lokasi)	3		
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Biofarmakologi			
	Sarana produksi biofarmakologi yang dibangun (Unit)	2		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan			
	Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan perairan (Lokasi)	3		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Kepulauan Talaud yang mandiri			
	Tingkat kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud (Skala 1-5)	-		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya pendataan pergaraman			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase Pendataan pergaraman yang dilaksanakan (%)	100,00		
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			24.510	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Infrastruktur Kelautan dan Perikanan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar			
	Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarananya (Kawasan)	3		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Morotai yang Mandiri			
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Kepulauan Morotai (Skala 1-5)	-		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Dilindungi dan Dikuatkan			
	Komunitas masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi dan dikuatkan (kumulatif) (Komunitas)	3		
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Komunitas Masyarakat Tradisional dan Lokal Di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Difasilitasi Dalam Rangka Perlindungan (Komunitas)			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Komunitas masyarakat lokal dan tradisional yang difasilitasi perlindungannya (Komunitas)	4		
Sasaran Kegiatan	Pulau-pulau Kecil dan Pulau-pulau Kecil Terluar yang Difasilitasi Pemanfaatannya			
	Pulau-pulau kecil/terluar yang memiliki sertipikat hak atas tanah dan/atau difasilitasi pemanfaatannya (Pulau)	8		
Perencanaan Ruang Laut			234.883	Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Sasaran Kegiatan	Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut			
	Pemanfaatan ruang laut (Lokasi)	50		
	Pengendalian pemanfaatan ruang laut yang diselesaikan (Lokasi)	34		
Sasaran Kegiatan	Perencanaan Ruang Laut dan zonasi Pesisir			
	KSN dan KSNT yang memiliki materi teknis KSN dan KSNT PPKT serta rencana zonasi KSNT non PPKT yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan (Kawasan)	7		
	Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil	10		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	(RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Provinsi)			
	Perairan laut antar wilayah yang memiliki Rencana Zonasi kawasan antar wilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan (Kawasan)	3		
	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Dokumen)	1		
	Wilayah Laut yang memiliki dokumen perencanaan pengelolaan hasil sedimentasi (Dokumen)	5		
Sasaran Kegiatan	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang Mandiri			
	Tingkat Kemandirian SKPT Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)	-		
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan			82.500	Ditjen Perikanan Tangkap
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing			
-	Persentase kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang operasional sesuai standar (%)	10,00	-	-

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Pemanfaatan Hasil Pengembangan Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing	-	-	-
	Persentase hasil pengembangan penangkapan ikan yang dimanfaatkan (%)	72,00		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi			
	Persentase awak kapal perikanan yang tersertifikasi / terlindungi (%)	10,00		
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			184.355	Ditjen Perikanan Tangkap
Sasaran Kegiatan	Pemenuhan Prasarana Pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang Optimal			
	Persentase pemenuhan prasarana pemungutan PNBP pasca produksi (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang Optimal			
	Persentase pelabuhan perikanan yang dikembangkan dan ditingkatkan fasilitasnya (%)	6,00		
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan yang Berdaya Saing			
	Tingkat operasional pelabuhan perikanan (%)	77,50		
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			182.350	Ditjen Perikanan Tangkap

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kenelayanan yang Maju dan Berdaya Saing		-	
	Persentase pengelolaan kenelayanan yang maju dan berdaya saing (%)	70,00	-	
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Perizinan Sesuai Ketentuan		-	
	Persentase pengelolaan perizinan berusaha sub sektor perikanan tangkap sesuai ketentuan (%)	90,00	-	
Sasaran Kegiatan	Korporasi Nelayan yang Dikembangkan		-	
	Korporasi nelayan yang dikembangkan (Korporasi)	15	-	
Pengelolaan Sumber Daya Ikan			25.100	Ditjen Perikanan Tangkap
Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Sumber Daya Ikan di WPPNRI yang Bertanggung Jawab		-	
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan (%)	90,00	-	
	Persentase pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya ikan di WPPNRI (%)	100,00	-	
	Persentase pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan Laut Lepas (%)	82 100	-	
Sasaran Kegiatan	Produktivitas Perikanan Perairan Darat Meningkat		-	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase jumlah WPP perairan darat yang dikelola sumber daya ikannya (%)	71,00	-	
Pengelolaan Perbenihan Ikan			141.633	Ditjen Perikanan Budi Daya
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Perbenihan Ikan yang Berkelanjutan			
	Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	120		
	Bantuan Benih Ikan Air Tawar, Payau dan Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	86.887.862		
	- Bantuan Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	32.604.743		
	- Bantuan Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	51.632.039		
	- Bantuan Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	2.651.080		
	Kebijakan Tata kelola Bidang Perbenihan (Rekomendasi Kebijakan)	8		
	Produksi Induk Unggul untuk bantuan dan operasional UPT (ekor)	1.061.072		
	- Bantuan Calon Induk Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	45.868		
	- Bantuan Calon Induk Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	15.060		
	- Bantuan Calon Induk Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat (ekor)	229		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	- Produksi Calon Induk (ekor)	1.000.000		
	Bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat (kg)	26.300		
	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan (Lembaga)	150		
	Pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan (Unit)	3		
	Infrastruktur kawasan budi daya rumput laut-lautan sejahtera (Unit)	1		
	Kluster komoditas unggulan berbasis kawasan yang dibangun bagi Masyarakat (Unit)	2		
	- Kluster Komoditas Rumput Laut (Unit)	2		
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan			478.577	Ditjen Perikanan Budi Daya
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Kawasan dan Kesehatan yang Berkelanjutan			
	Sarana kawasan perikanan budi daya yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	96		
	Sampel monitoring residu dan surveilans penyakit yang diuji (Sampel)	5.490		
	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP) (Unit)	10		
	Kluster kawasan tambak udang dan bandeng yang dikembangkan (Unit)	10		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Prasarana produksi di UPT yang direhabilitasi dan ditingkatkan (Unit)	5		
	Peralatan laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan (Unit)	15		
	Kebijakan tata kelola bidang kawasan dan kesehatan ikan (Rekomendasi Kebijakan)	9		
	Budi daya udang terintegrasi (ISF) yang dibangun (Unit)	1		
	Infrastruktur budi daya udang berkelanjutan yang ditingkatkan (Unit)	8		
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan			173.250	Ditjen Perikanan Budi Daya
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha Budi Daya yang Berkelanjutan			
	Bantuan premi asuransi pembudidaya ikan skala kecil yang Disalurkan (Orang)	500		
	Rekomendasi bidang lahan budi daya yang disiapkan sertifikasinya (Orang)	3.000		
	Kebijakan tata kelola bidang produksi dan usaha (Rekomendasi Kebijakan)	7		
	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	1.070		
	Sarana produksi dan usaha yang dikembangkan (MP Korporasi) (Unit)	15		
	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) yang diterbitkan (Lembaga)	1		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Perizinan usaha perikanan budi daya yang diterbitkan (Lembaga)	50		
	Konferensi dan Event Perikanan budi daya (Kegiatan)	2		
	Sosialisasi/diseminasi/bimtek bidang perikanan budi daya (Orang)	11.000		
	Kluster komoditas unggulan berbasis Kawasan (Unit)	2		
	- Kluster Komoditas Nila Salin (Unit)	1		
	- Kluster Komoditas Kepiting (Unit)	1		
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan			33.210	Ditjen Perikanan Budi Daya
Sasaran Kegiatan	Terkelolanya Sistem Pakan dan Obat Ikan yang Berkelanjutan			
	Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat (Unit)	40		
	Kebijakan tata kelola bidang pakan dan obat ikan (Rekomendasi Kebijakan)	8		
	Pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat dan operasional produksi di UPT (kg)	950.000		
	Sampel pakan ikan yang diuji (sampel)	470		
	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) diterbitkan (lembaga)	52		
	Pakan dan obat ikan yang diregistrasi (Produk)	150		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Kluster komoditas unggulan berbasis Kawasan (Unit)	1		
	- Kluster Komoditas Lobster (Unit)	1		
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			57.574	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Produk Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas			
	Jumlah rekomendasi kebijakan pemasukan hasil perikanan berbasis mekanisme neraca komoditas yang disediakan (Rekomendasi kebijakan)	5,00		
Sasaran Kegiatan	Terciptanya Kesepakatan Kemitraan Antarpelaku Usaha KP Dalam Rangka Pengadaan, Penyimpanan, dan Distribusi Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah kesepakatan kemitraan antarpelaku usaha KP dalam rangka pengadaan, penyimpanan, dan distribusi hasil KP (Kesepakatan)	29,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Penyimpanan Produk Kelautan dan Perikanan			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Jumlah sarana penyimpan produk KP yang disediakan (Unit)	15,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Distribusi Logistik Produk Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah sarana distribusi logistik produk KP yang disediakan (Unit)	5,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Distribusi Logistik Produk Kelautan dan Perikanan Mendukung Major Project Korporasi Usaha			
	Jumlah sarana distribusi logistik produk KP (MP Korporasi) (Unit)	5,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Prasarana Pendukung Operasional Gudang Beku 1000 Ton			
	Prasarana pendukung operasional gudang beku 1000 ton yang dibangun (Unit)	4,00		
Sasaran Kegiatan	Terbinanya Lembaga Pengelola Gudang Beku yang di Fasilitas Penerapan Sistem Resi Gudang			
	Lembaga pengelola gudang beku yang difasilitasi penerapan sistem resi gudang yang dibina (Lembaga)	10,00		
Sasaran Kegiatan	Terbinanya Lembaga Pengelola Logistik Ikan Dalam Rangka Penataan Rantai Pasok			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Lembaga pengelola logistik ikan yang dibina dalam rangka penataan rantai pasok (Lembaga)	8,00		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut mendukung Logistik Hasil Perikanan			
	Lembaga Pengelola Kapal Pengangkut yang di Fasilitas mendukung Logistik Hasil Perikanan (Lembaga)	8,00		
Sasaran Kegiatan	Terimplementasikannya Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA)			
	Implementasi Sistem Telusur dan Logistik ikan Nasional (STELINA) (Unit)	1,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan Informasi Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah data dan informasi logistik hasil KP (Data)	4,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional Gudang Beku			
	Jumlah sarana pendukung operasional gudang beku yang disediakan (Unit)	287,00		
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan			22.724	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
				Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Promosi Usaha dan Investasi			
	Promosi usaha dan investasi KP yang dilaksanakan (Promosi)	4,00		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi Dan Pembinaan Usaha			
	UMKM KP yang difasilitasi pembiayaan usaha (UMKM)	3565,00		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Usaha KP			
	Jumlah lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya (Lembaga)	45,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Dokumen Peluang Investasi yang <i>Ready to offer</i>			
	Jumlah dokumen peluang investasi yang <i>ready to offer</i> (Dokumen)	4,00		
Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan			709.414	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif			
	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	81,00		
	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	81,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang Akurat			
	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan informasi intelijen SDKP (Indeks)	81,00		
	Tingkat pemahaman peserta bimtek aplikasi SPKP (Tingkat)	80,00		
	Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SPKP (Indeks)	81,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif			
	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (Indeks)	94,00		
	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (Indeks)	91,00		
	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (Indeks)	91,00		
	Persentase pemenuhan logistik kapal pengawas (%)	100,00		
	Indeks kesiapan awak kapal pengawas (Indeks)	79,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang operasi armada pengawasan SDKP (%)	100		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			
	Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100		
	Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100		
	Indeks kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan (Indeks)	100,00		
	Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	81,00		
	Inovasi yang dihasilkan bidang perawatan dan pemeliharaan pengawasan SDKP (Inovasi)	1,00		
	Nilai supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP (Nilai)	81,00		
	persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP (%)	100,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan			19.585	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyadartahuan Nelayan yang Efektif Bagi Nelayan Untuk Tidak Melintas Batas Ke Negara Lain Secara Ilegal			
	Nilai pemahaman nelayan untuk tidak melintas batas ke negara lain secara ilegal (Nilai)	74,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas			
	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	80,00		
	Indeks kesesuaian penerapan sanksi administratif (Indeks)	80,00		
	Indeks tindak lanjut hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80,00		
	Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif (Indeks)	80,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas			
	Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	93,00		
	Indeks kualitas supervisi/monitoring dan evaluasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)	70,00		
	Indeks sinergi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dengan lembaga lain (Indeks)	70,00		
	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan (%)	100,00		
	Persentase penyelesaian rancangan NSPK lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	100,00		
	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (%)	78,00		
	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran (Inovasi)	1,00		
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan			34.203	Ditjen Pengawasan Sumber Daya

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
				Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyelebaran Pengetahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang Efektif			
	Nilai pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan yang bertanggung jawab (Nilai)	74,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan			
	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen kelautan (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan			
	Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (Nilai)	100,00		
	Nilai pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	80,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Nilai kualitas verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya kelautan (Nilai)	81,00		
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pembinaan dan perbaikan pelaku usaha kelautan (%)	60,00		
	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDK (Nilai)	80,00		
	Persentase penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian kewajiban pelaku atas penyelesaian sengketa (%)	75,00		
	Persentase penyelesaian rancangan nspk bidang pengawasan sumber daya kelautan lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (%)	100,00		
	Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Nilai)	78,00		
	Inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (Inovasi)	1,00		
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan			29.837	Ditjen Pengawasan Sumber Daya

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
				Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penysadartahuan Masyarakat Bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan			
	Nilai pemahaman peserta kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan (Nilai)	74,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan			
	Persentase penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan			
	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan yang mendapat atensi pimpinan dan/atau berdampak nasional (Nilai)	100,00		
	Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (Nilai)	100,00		
	Nilai kualitas penyelesaian verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Nilai)	81,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan (%)	60,00		
	Nilai kualitas pembinaan dan pengembangan pengawasan SDP (Nilai)	80,00		
	Nilai keandalan sistem pengawasan kapal perikanan (eSLO) (Nilai)	75,00		
	Persentase penyelesaian tindak lanjut internal hasil pengawasan perikanan dan penyediaan substansi teknis dalam sanksi administrasi perikanan (%)	80,00		
	Persentase penyelesaian bahan rancangan nspk bidang pengawasan sumber daya perikanan (%)	100,00		
	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat PPSDP (Nilai)	78,00		
	Inovasi pengawasan sumber daya perikanan yang dihasilkan (Inovasi)	1,00		
Analisis Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			1.000	BPPSDMKP
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Responsif Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan			
	Rekomendasi kebijakan responsif sosial ekonomi kelautan dan perikanan (Rekomendasi Kebijakan)	8		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Program Nilai Tambah dan Daya Saing			221.655	
Sasaran Program 1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing			
	Volume produk olahan KP berdaya saing (Juta Ton)	7,50		
Sasaran Program 2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Meningkat			
	Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	7,20		
	Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)	59,00		
Sasaran Program 3	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat			
	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75		
Sasaran Program 4	Sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang berdaya saing			BPPMHKP
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	70,00		
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (%)	70,00		
	Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor (Negara)	41		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase pengawasan mutu hasil Kelautan dan perikanan di wilayah RI (%)	70		
	Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan mutu hasil KP yang ditetapkan (%)	70		
Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			78.741	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Promosi Produk Perikanan			
	Promosi gemarikan yang dilaksanakan (Promosi)	185,00		
	Promosi skala internasional yang dilaksanakan (Promosi)	6,00		
	Promosi produk kelautan dan perikanan dalam negeri (Promosi)	4,00		
	Promosi produk kelautan dan perikanan di dalam negeri oleh daerah (Promosi)	38,00		
Sasaran Kegiatan	Terbangunnya Prasarana Pemasaran Kelautan dan Perikanan			
	Prasarana pemasaran kelautan dan perikanan yang dibangun (Unit)	13,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Bantuan Peralatan/Sarana Pemasaran			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Peralatan pemasaran yang disediakan (Unit)	6000,00		
	Kendaraan pemasaran alih teknologi informasi yang disediakan (Unit)	2,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan			
	Lokasi pembinaan pengelolaan pasar ikan (Lembaga)	100,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sistem Informasi Pemasaran			
	Sistem informasi bursa pasar ikan yang dibangun (Sistem Informasi)	1,00		
Sasaran Kegiatan	Terfasilitasinya Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor			
	Forum perluasan akses pasar negara tujuan ekspor yang di fasilitasi (Forum)	3,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Data dan informasi Publik Bidang Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Profil pasar ekspor hasil kelautan perikanan (Data)	4,00		
	Profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan (Data)	4,00		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pendampingan Major Project Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Kegiatan pendampingan <i>major project</i> pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Dokumen)	1,00		
Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan			71.858	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan dan Perikanan			
	Produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) (Produk)	10000,00		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina (UMKM)	2675,00		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya UPI Skala Menengah Besar yang dibina			
	UPI skala menengah besar yang dibina (Industri)	500,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Industri pengolahan yang dibina oleh daerah (Industri)	2340,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP			
	Sarana sistem rantai dingin Hasil KP (Unit)	448,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Sarana pengolahan Hasil KP yang disediakan (Unit)	279,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Sarana Pengolahan MP Korporasi			
	Sarana pengolahan MP Korporasi yang disediakan (Unit)	8,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Prasarana Rantai Dingin dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan			
	Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun (Unit)	1,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Layanan Data dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			
	Profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	3,00		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil Kelautan dan Perikanan			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil KP yang disediakan (Produk)	15,00		
Kegiatan Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan			8.600	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Standarisasi Produk Melalui Penyusunan Bahan Rancangan Bahan Standar Indonesia (RSNI) serta Sertifikasi dan Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan			
	Jumlah bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang disediakan (RSNI)	5		
	Jumlah produk kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji (Produk)	500		
Sasaran Kegiatan	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Inkubasi Bisnis dan Pendampingan Teknologi			
	Pelaku usaha yang dibina dalam inkubator bisnis (UMKM)	55		
	Pelaku usaha yang difasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan perikanan (UMKM)	45		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan			
	Orang yang menerima diseminasi dan diversifikasi produk KP (Orang)	1000		
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			30.056	BPPMHKP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			
	Persentase unit usaha budi daya yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Cara Budi Daya Ikan yang Baik-CBIB)	70,00		
	Persentase unit usaha pembenihan ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Cara Pembenihan Ikan yang Baik-CPIB)	70,00		
	Persentase unit usaha Produksi dan distribusi obat ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Cara Produksi Obat Ikan yang Baik-CPOIB dan Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik-CDOIB)	75,00		
	Persentase unit usaha produksi pakan ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan	75,00		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	mutu dan keamanan (Cara Produksi Pakan Ikan yang Baik-CPPIB)			
	Persentase kapal ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan (Cara Penangkapan Ikan yang Baik-CPIB Kapal)	70,00		
	Persentase UMKM dan skala menengah besar yang menerapkan <i>good manufacturing practices sanitation standar operating procedure</i> dan diterbitkan sertifikat kelayakan pengolahan (%)	70,00		
	Jumlah sertifikat <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (Sertifikat)	3000,00		
	Persentase produk impor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	100,00		
	Persentase produk ekspor yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	99,00		
	Persentase wilayah perairan RI yang diawasi dari cemaran berbahaya (%)	70,00		
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (Unit)	500,00		
Kegiatan Manajemen Mutu			32.400	BPPMHKP

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar			
	Persentase tindak lanjut rekomendasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (%)	70,00		
	Persentase unit usaha/lembaga yang menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (QA) sesuai standar dan regulasi (%)	70,00		
	Persentase pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu (%)	75,00		
	Persentase tingkat efektivitas unit kerja penjaminan mutu yang dikendalikan (%)	80,00		
	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (Orang)	10000,00		
	Jumlah standardisasi metode yang divalidasi laboratorium acuan (Metode)	10,00		
	Jumlah parameter uji mutu hasil KP yang dihasilkan laboratorium acuan (Parameter)	20,00		
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			372.295	BPPSDMKP
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di Dunia usaha dan Dunia Industri/DUDI (%)	72,00		
Sasaran Program	SDM KP Peserta Diklat yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan)			
	Lulusan pendidikan dan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) (Orang)	392		
Sasaran Program	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditumbuhkan dan Dikembangkan			
	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok)	3000		
	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya (Kelompok)	2000		
Sasaran Program	Iptek Hasil Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat			
	Desa/Kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP (Desa perikanan cerdas) (Desa)	15		
Sasaran Program	Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan yang Ditingkatkan kapasitasnya			
	Prasarana dan sarana pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	53		
Pendidikan Kelautan dan Perikanan			199.000	BPPSDMKP

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten			
	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten (Orang)	8020		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengabdian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan			
	Pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan (Kelompok Masyarakat)	14		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kajian Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan			
	Penelitian terapan pendidikan tinggi kelautan dan perikanan (Kajian)	22		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang Terstandar			
	Peralatan dan mesin pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	21		
	Prasarana pendidikan tinggi kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		
	Prasarana pendidikan menengah kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	3		

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Sarana teknologi informasi dan komunikasi pendidikan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	9		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan			
	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pendidikan Kelautan Perikanan (NSPK)	5		
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			173.295	BPPSDMKP
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (Orang)	35173		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan			
	Masyarakat kelautan dan perikanan yang bersertifikat Kompetensi (Orang)	1450		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan Kelautan dan Perikanan			
	Kajian inovasi yang diterapkan untuk pelatihan kelautan dan perikanan (Kaji Terap)	8		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (DALAM JUTA RUPIAH)	UNIT KERJA
	Kelompok pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan yang disuluh (Kelompok)	47000		
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
	Inovasi yang diterapkan untuk penyuluhan kelautan dan perikanan (Kelompok masyarakat)	49		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan			
	Prasarana dan sarana dan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	11		
Sasaran Kegiatan	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP			
	Norma, standar, prosedur, dan kriteria pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan (NSPK)	8		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO